

**PERAN HPMM CABANG ALLA DALAM MENGAWAL
(KINERJA) PEMERINTAH DI KABUPATEN ENREKANG**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

**ABDUL WAHID
10538228712**

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“GAGAL ITU BIASA, TETAPI KEGAGALAN
YANG SESUNGGUHNYA ADALAH SAAT KITA
MENYERAH DAN BERHENTI MENCoba”**

Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu,
maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang

(HR. Turmudzi)

Kupersembahkan karya ini

Teruntuk ibu, bapak, dan siapa-siapa

Yang tidak sibuk memikirkan dirinya sendiri

ABSTRAK

Abdul Wahid.2018. Peran HPMM Cabang Alla dalam Mengawal Kinerja Pemerintah di Kabupaten Enrekang.Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Nawir dan Suardi.

Penelitian tentang Peran HPMM Cabang Alla dalam Mengawal Kinerja Pemerintah di Kabupaten Enrekang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Peran Serta HPMM Cabang Alla Terhadap Kinerja Pemerintah di Kabupaten Enrekang. Apa Dampak yang Diperoleh Masyarakat dari Peran yang Dilakukan HPMM Cabang Alla. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran serta HPMM Cabang Alla terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui dampak yang diperoleh masyarakat terhadap peran HPMM Cabang Alla. Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, teknik dokumentasi dari hasil foto, rekaman suara dan arsip yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian adalah pengurus HPMM Cabang Alla, pemerintah dan masyarakat Kecamatan Alla yang dianggap bisa memberikan informasi atau data yang sesuai dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran HPMM dalam pemberdayaan masyarakat adalah fasilitator yaitu melakukan persiapan masyarakat, menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah, dengan demikian konflik dapat terdeteksi lebih awal. Peran lainnya adalah advokasi (*advocacy*) yang ditujukan sebagai korelasi atas penyimpangan-penyimpangan, sedangkan misi pokoknya bagaimana membuat masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri dan tidak menyerahkan semuanya untuk diurus oleh pemerintah. Artinya HPMM Cabang Alla menjadi rekan kerja pemerintah di Kabupaten Enrekang. Untuk dampak sosial terbagi dua yaitu Dampak positifnya adalah komunikasi, penyampaian isu dan pengambilan kebijakan yang tidak sesuai dengan pemerintah terasa mudah dengan bantuan HPMM Cabang Alla sebagai pendamping (*fasilitator* dan *motivator*) dan memperhatikan unsur partisipasi masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah dengan adanya beberapa pihak/orang yang mengambil keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan organisasi dan aspirasi masyarakat. Dan sebagian masyarakat juga yang mempunyai anak kuliah beranggapan bahwa organisasi akan mengganggu ataupun memperlambat masa kuliah bagi anak-anak mereka.

Kata kunci: Peran, HPMM Cabang Alla, Kinerja

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kata yang paling indah bersenandung di lidah adalah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada hambanya. Dengan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peran HPMM Cabang Alla Dalam Megawal Kinerja Pemerintah di Kabupaten Enrekang*” sebagai salah satu tugas akademik, Pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Begitu pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat-sahabat-Nya dan orang-orang yang mengikuti Beliau. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, hal itu dapat teratasi dengan baik berkat kerja keras dan tekad yang bulat serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa melangkah untuk mencapai suatu tujuan, hambatan dan rintangan menemani silih berganti. Namun, berkat rahmat dan hidayah-Nya yang disertai do’a dan ikhtiar sehingga semua itu dapat dijalani dengan ikhlas dan tawadhu. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta salam penuh hormat dengan segenap cinta dan kasih sayang kepada orang tua saya Ayahanda Arif, Ibunda Risma Rio, Adik saya Humairah Arif dan Magfirah Arif dan seluruh keluarga penulis. Terima

kasih atas curahan kasih sayang, dorongan, do'a, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai hambatan dan tantangan namun berkat bimbingan, inovasi dan sumbangsi pemikiran dari berbagai pihak, segala hambatan dan tantangan yang dihadapi penulis dapat teratasi. Dengan penuh rasa hormat penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada, Dr. Muhammad Nawir S.Pd., M.Pd. Selaku pembimbing I dan Suardi, S.Pd., M.Pd. Selaku pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada, Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE,MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib S.Pd., M.Pd., PhD. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr. H. Nursalam, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Muhammad Akhir, S.Pd., M.Pd. Selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan segenap Dosen dan para Staff/Pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali serangkaian berbagai ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Pemerintah Kecamatan Alla, HPMM Cabang Alla dan Masyarakat Kecamatan Alla, terima kasih telah memberikan kesempatan dan kerja samanya kepada penulis untuk melakukan

penelitian. Teman-teman Jurusan Pendidikan Sosiologi angkatan 2012 kelas A, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, kebersamaan yang tiada hentinya dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk vespa hijau saya (si Kace) yang sejak sementara kuliah sampai dengan penulis menyusun skripsi ini selalu menjadi teman berkendara dan pembantu kaki penulis mengurus dan bimbingan. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis telah berusaha untuk menjadikan skripsi ini sebagai sebuah karya yang bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan para pembaca. Namun, dibalik semua itu saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan menuju kesempurnaan skripsi ini.

Mengiringi penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya, Amin.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Makassar, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERJANJIAN.....	v
KARTU KONTROL PEMBIMBING I.....	vi
KARTU KONTROL PEMBIMBING II.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Teori.....	11
1. Penelitian Relevan.....	11

2. Pengertian Peran.....	13
3. Organisasi HPMM	14
4. Mengawal Kinerja Pemerintah.....	21
5. Pemerintah Daerah	31
6. Landasan Teori Sosiologi.....	33
B. Kerangka Konsep	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian	37
D. Fokus Penelitian	38
E. Instrumen Penelitian.....	38
F. Jenis dan Sumber Data.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Teknik Analisis Data	42
I. Teknik Keabsahan Data	43
BAB IV DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN DAN DESKRIPSI KHUSUS LATAR PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang sebagai Tempat Penelitian .	47
1. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang	47
2. Keadaan Geografis Dan Iklim.....	51
3. Kondisi Topografi, Geologi dan Hidrologi.....	54
B. Deskripsi Khusus HPMM Cabang Alla Sebagai Latar Penelitian	56

1. Sejarah Singkat HPMM Cabang Alla	56
2. Hubungan HPMM Cabang Alla dengan Pemerintah Kecamatan Alla.....	58
3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Alla.....	59
4. Mata Pencaharian	60
5. Kehidupan Sosial Budaya	61
6. Kehidupan Keberagamaan	63
BAB V PERAN SERTA HPMM CABANG ALLA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN.....	66
BAB VI DAMPAK YANG DIPEROLEH MASYARAKAT DARI PERAN HPMM CABANG ALLA.....	73
1. Dampak Sosial	74
BAB VII PERAN HPMM DALAM MENGAWAL PEMERINTAH SEBUAH PEMBAHASAN TEORETIS	84
A. Peran Serta HPMM Cabang Alla terhadap Kinerja Pemerintah di Kabupaten Enrekang	84
B. Dampak yang Diperoleh Masyarakat dari Peran yang Dilakukan oleh HPMM Cabang Alla.....	87
BAB VIII SIMPULAN DAN SARAN	90
A. Simpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Informan

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Lembar Interpresentasi

Lampiran 4 : Persuratan

Lampiran 5 : Dokumentasi

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

4.1 Tingkat Pendidikan di Kecamatan Alla	60
--	----

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir.....	36
3.1 Model Analisis Data.....	43
4.1 Peta Kabupaten Enrekang	48
5.1 Aksi Solidaritas Korban Kebakaran di Kecamatan Alla.....	71
5.2 Persiapan Bakti Sosial HPMM Cabang Alla di Kecamatan Alla.....	71
6.1 Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla	82
6.2 Kegiatan Perayaan HUT RI ke 72.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

Pelajar dan mahasiswa adalah bagian dari generasi muda Indonesia dan generasi Islam, sadar akan hak dan kewajiban kepada masyarakat, bangsa dan agama sehingga bertekad untuk mendarma baktikan segenap potensi yang dimiliki. Niat suci tersebut kemudian terlembagakan dalam sebuah wadah perjuangan yang terorganisir dengan senantiasa mengedepankan semangat kekeluargaan dalam pembangunan pribadi-pribadi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dengan tetap menjadikan Al-Qur'an dan As sunnah sebagai pedoman hidup.

Mahasiswa yang aktif berorganisasi secara konsisten memiliki pemahaman bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan sebuah sarana yang efektif dalam mengkader dirinya sendiri untuk kedepan. Sebagian diantaranya masih mempunyai keyakinan pandangan bahwa kampus merupakan tempat menimba ilmu yang tidak terbatas hanya kepada pelajaran semata. Dengan bergabung aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang bersifat *intra* ataupun *eksra* kampus berefek kepada perubahan yang signifikan terhadap wawasan, cara berpikir, pengetahuan dan ilmu-ilmu sosialisasi, kepemimpinan serta manajemen kepemimpinan yang *notabene* tidak diajarkan dalam kurikulum normatif

Perguruan Tinggi. Namun, dalam berorganisasi dapat diraih dengan memanfaatkan statusnya sebagai mahasiswa.

Pemahaman arti penting sebuah organisasi dan aktivitas organisasi mahasiswa adalah salah satu persoalan yang pertama-tama harus diluruskan. Adanya anggapan bahwa berorganisasi berarti berdemonstrasi atau berorganisasi khususnya di kampus tidak lebih dari sekadar membuang sebagian waktu, energi, ajang mencari kawan atau mencari jodoh merupakan bukti adanya kesalahpahaman tentang persepsi sebagian mahasiswa tentang organisasinya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, organisasi mahasiswa dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dirinya. Dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai miniatur pemerintahan negara dalam penyelenggaraan negara yang semestinya dilakukan oleh aparaturnegara. Maka, organisasi mahasiswa harus mengadopsi prinsip-prinsip pemerintahan layaknya dalam sebuah negara dan dikolaborasikan dengan prinsip sebagai organisasi pengkaderan dan perjuangan. Dengan demikian, satu media yang dapat membentuk kematangan mahasiswa dalam hidup bermasyarakat ialah organisasi. Dengan senantiasa berorganisasi maka mahasiswa akan senantiasa terus berinteraksi dan beraktualisasi, sehingga menjadi pribadi yang kreatif serta dinamis dan lebih bijaksana dalam persoalan yang mereka hadapi.

Tujuan dasar organisasi seperti Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM), sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan usaha-usaha yang teratur, terencana dan berkesinambungan

dalam sebuah sentuhan manajemen organisasi yang profesional. Implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah aktifitas kelembagaan merupakan penentu utama bagi tercapainya tujuan organisasi. Oleh sebab itu, kemampuan personal pengurus organisasi dalam *planning, organizing, Actuating* dan *Controlling* sebagai sebuah bangunan sistem yang harus tercipta dalam mengawal perjalanan roda organisasi.

Perumusan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) secara makro ini dilakukan sebagai upaya memberi solusi alternatif terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi. Dengan demikian menjadi syarat mutlak bahwa proses rekayasa dalam rangka perumusan kebijakan umum program harus dimulai dan disusun dengan senantiasa secara cermat, cerdas dan penuh kearifan melakukan inventarisasi terhadap berbagai indikasi, baik makro maupun mikro yang mencerminkan kondisi realitas yang sedang melingkupi organisasi sampai hari ini. Diharapkan bahwa rumusan GBHO mampu menjadi haluan yang jelas secara garis besar dalam memaksimalkan fungsi dan peran HPMM melalui realisasi program kerja pada seluruh level struktur pimpinan HPMM secara terarah, terukur, terpadu, dan berkesinambungan.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran inilah, disusun arah penyelenggaraan roda organisasi dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), yang memuat konsepsi penyelenggaraan organisasi secara menyeluruh untuk membangun tatanan pencapaian tujuan organisasi, serta mewujudkan kemajuan disegala bidang yang akan menempatkan organisasi pada jenjang kedewasaan, kokoh dan kuat, serta profesionalisme.

Tujuan sebuah organisasi hanya dapat diwujudkan dengan usaha-usaha yang teratur, terencana dan berkesinambungan dalam sebuah sentuhan manajemen organisasi yang profesional. Implementasi fungsi-fungsi manajerial dalam sebuah aktifitas kelembagaan organisasi merupakan penentu utama bagi terciptanya tujuan organisasi. Oleh sebab itu, kemampuan personalia pengurus organisasi dalam *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* sebagai sebuah bangunan sistem merupakan keharusan yang harus tercipta dalam mengawal perjalanan roda organisasi.

Planning organisasi sebagai sebuah tahapan awal yang harus dilakukan dalam perjalanan organisasi hendaknya dirumuskan secara utuh dengan senantiasa memperhatikan seluruh sisi dan aspek organisasi dengan segala peluang dan keterbatasan yang dimiliki oleh organisasi. Untuk itu *planning* organisasi yang dirumuskan diatas seluruh bangunan asumsi sebagai sebuah hasil pembacaan terhadap realitas yang melingkupi organisasi tersebut.

Adapun sisi lain dari manajemen organisasi adalah *organizing* atau pengorganisasian seluruh elemen dalam sebuah organisasi. Penciptaan beberapa elemen struktur dalam sebuah organisasi harus senantiasa mempertimbangkan bagaimana, sehingga elemen-elemen struktur dalam organisasi tersebut dapat mendukung terciptanya kultur dan mekanisme kerja organisasi yang efektif. Dalam rangka menciptakan efektifitas kerja dari seluruh elemen struktur dalam sebuah sistem dan mekanisme kerja antara elemen struktur organisasi tersebut secara profesional dan profesional.

Demikian halnya dengan proses *actuating* atau proses realisasi program kerja organisasi oleh seluruh elemen struktur dalam organisasi tersebut hendaknya ditata dalam sebuah manajemen kerja dengan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan secara jelas dan betul-betul mencerminkan sebuah sistem kerja organisasi. Dalam menjamin terlaksananya program secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan sebelumnya, maka *controlling* merupakan bagian yang urgen sebagai kerangka sistem kerja organisasi yang tak dapat dipisahkan dengan bagian lainnya.

Dalam rangka mempertegas eksistensi organisasi HPMM sebagai satu-satunya lembaga kemahasiswaan yang *representatif* untuk mewadahi seluruh pelajar dan mahasiswa Massenrempulu, maka hal yang paling strategis untuk dilakukan adalah dengan mempertegas peran dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi HPMM. Berkenaan dengan itu, HPMM akan senantiasa dituntut untuk melakukan pembenahan secara internal organisasi melalui upaya pemantapan dan penanganan proses pengkaderan secara profesional dalam rangka menciptakan kader-kader HPMM yang memiliki komitmen dan integritas yang mantap yang pada gilirannya kader-kader tersebut akan memiliki kesiapan baik secara mental maupun konsepsional dalam rangka mendorong dan mewarnai proses dinamisasi kelembagaan HPMM kearah yang lebih baik.

Pada saat yang bersamaan pula HPMM diperhadapkan pada sebuah keharusan organisatoris sebagai sebuah organisasi yang pada pundaknya melakukan tanggung jawab sosial untuk turut memainkan peran-peran strategis

dalam menentukan masa depan Massenrempulu kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu, dalam momentum musyawarah besar sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi menetapkan beberapa rekomendasi organisasi baik untuk lingkup internal maupun eksternal organisasi sebagai salah satu bentuk penjabaran dari *strong point* kebijakan organisasi yang harus segera direalisasikan dalam waktu dekat demi menjawab beberapa kebutuhan mendasar organisasi secara khusus dan aspirasi masyarakat Massenrempulu secara umum.

Peran serta HPMM terhadap kinerja pemerintah merupakan bentuk dari kesadaran partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Pada awalnya fungsi yang diperankan oleh HPMM adalah melakukan kontrol sosial serta membangun kesadaran kolektif untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pembangunan. Peran HPMM dalam pemberdayaan masyarakat adalah fasilitator yaitu melakukan persiapan masyarakat, menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah, dengan demikian konflik dapat terdeteksi lebih awal. Peran lainnya adalah advokasi (*advocacy*) yang ditujukan sebagai korelasi atas penyimpangan-penyimpangan, sedangkan misi pokoknya bagaimana membuat masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri dan tidak menyerahkan semuanya untuk diurus oleh pemerintah. Artinya HPMM menjadi rekan kerja pemerintah di kabupaten Enrekang.

Secara operasional, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga pemerintah yang sudah ada di masyarakat serta HPMM. Disini HPMM menempatkan diri sebagai pendamping (*fasilitator* dan *motivator*) yang bersifat komplementer terhadap program-program pemerintah.

Yang membedakan peran HPMM dan pemerintah adalah strategi dan pendekatan yang dipakai, kegiatan pemerintah pada umumnya bersifat massal, parsial dan kurang memperhatikan unsur partisipasi, sedangkan kegiatan HPMM umumnya bersifat terbatas, namun menyeluruh, mencakup persiapan sosial dan pembinaan secara intensif. Jadi, antara pemerintah di kabupaten Enrekang dan HPMM harus saling berkerjasama karena masing-masing memiliki fungsi yang saling mendukung agar proses pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun struktur organisasi HPMM Cabang Alla, sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (PP-HPMM)

2. Majelis Pertimbangan Cabang

Koordinator : Muh. Dirham.O

Anggota : Nuzran Maggu

Muh. Taufik Ismail

Hairul Anwar

Nur Evha Fadli

3. Pengurus Harian

Ketua Umum : Muh. Derwin

Kabid Pendidikan dan Pengkaderan : Mursalim

Kabid Pembinaan Aparatur Organisasi : Ahmad Arifin

Kabid Jaringan dan Advokasi : Nur Fajrin

Kabid Minat dan Bakat : Zulfikar Hendra
Kabid Kerohanian : Muthmainnah Ahmad

Sekretaris Umum : Wiryo Ade Sarlita
Sekbid Pendidikan dan Pengkaderan : Misrianti
Sekbid Pembinaan Aparatur Organisasi : Nur Lela
Sekbid Jaringan dan Advokasi : Inar Fitri
Sekbid Minat dan Bakat : Nur Islamiah
Sekbid Kerohanian : Muh. Yusuf Budi Mulya

Bendahara Umum : Ayu Lestari
Wakil Bendahara Umum : Citra Amanda Saroring

Setiap bidang-bidang memiliki 10 staf yang menjadi penanggung jawab, kepanitiaan kegiatan, pelaksana program kerja dan pemegang wewenang bidangnya sendiri. Dalam setiap pelaksanaan program kerja, semua anggota bidang-bidang saling membantu dan bekerja sama sehingga program kerja selesai dengan efektif dan efisien. Dari tahun ke tahun HPMM Cabang Alla selalu melakukan perekrutan kader dan bakal calon pemegang kepengurusan organisasi kedepannya, dengan cara itu roda organisasi tetap berjalan, bertahan dan tetap menjalankan organisasi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian diatas, untuk melihat peran HPMM terhadap kinerja pemerintah maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai

“Peran HPMM Cabang Alla dalam Mengawal (Kinerja) Pemerintah di Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

Dari urain latar belakang maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran serta HPMM Cabang Alla terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Enrekang?
2. Apa Dampak yang diperoleh masyarakat dari peran yang dilakukan oleh HPMM Cabang Alla?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi peran serta HPMM Cabang Alla terhadap kinerja pemerintah di kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui dampak yang diperoleh masyarakat terhadap peran HPMM Cabang Alla.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan peneliti ini dapat menjadi sumber informasi dalam menambah khasanah keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu sosial (sosiologi) dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Organisasi HPMM

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi HPMM Cabang Alla dalam menciptakan kader yang siap dan bertanggung jawab untuk masa depan Enrekang.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai pengambil kebijakan, menjadikan sebagai bahan acuan dalam mengambil langkah dalam menghadapi dan mengatasi Peran HPMM terhadap kinerja Pemerintah.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai pelaku sosial, menjadikan wadah untuk menyampaikan pendapat tentang Peran HPMM terhadap kinerja Pemerintah.

4. Bagi Peneliti

Sebagai bahan pembelajaran untuk menambah referensi pengetahuan dan menjadi proses pembelajaran kedepannya serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang searah dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sukma, (2013). “Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Dalam Partai Politik Di Kecamatan Sukawati”. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa, untuk saat ini banyak opini yang menyatakan bahwa kedekatan organisasi kemasyarakatan (ormas) memang terlihat ada dengan partai politik tertentu. Kedekatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan salah satu partai politik juga di karenakan beberapa dari anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) ikut di dalam partai politik. Keterlibatan antara organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan partai politik, baru terlihat hanya dalam bentuk kegiatan partai politik yang dilaksanakan secara langsung dengan mengundang anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kegiatan partai politik dengan menggunakan seragam organisasi kemasyarakatannya (ormas). Keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan partai politik karena adanya dorongan dan dukungan serta bantuan yang di berikan oleh salah satu anggota partai politik kepada organisasi kemasyarakatan (ormas), sehingga menimbulkan ketertarikan untuk terlibat dalam kegiatan politik terutama pada

salah satu partai politik yang memberikan perhatian kepada organisasi kemasyarakatan (ormas).

Selanjutnya, penelitian oleh Sujana (2012). “Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Kesesuaian Peran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Badung Dan Buleleng)”. Hasil studi ini telah berhasil menunjukkan bahwa kompetensi, motivasi, kesesuaian peran, dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Lemahnya kinerja pegawai Inspektorat disebabkan karena rendahnya kompetensi, lemahnya motivasi, adanya ketidaksesuaian peran dan lemahnya komitmen, sehingga diwaktu yang akan datang pemerintah daerah dan pihak terkait harus lebih memperhatikan perbaikan kearah penyebab perilaku ini sehingga kelemahan yang terjadi dapat diminimalkan.

Penelitian lainnya dari Loviani (2015). “Kinerja Organisasi Pemerintah Desa Di Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau”. Hasil penelitian menunjukkan adanya temuan yang menyebabkan kinerja organisasi pemerintah desa di Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau, kurang optimal dalam melaksanakan tata tertib terkait dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan budaya organisasi pemerintah Desa Pisang yang malas yaitu hanya melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat cuma 2 hari kerja, kualitas sumber daya aparatur yang masih rendah dilihat dari tingkat pendidikan aparatur Desa Pisang SMA dan SMP. Ditambah

lagi kepemimpinan Kepala Desa Pisang yang belum efektif dilihat dari Kepala Desa yang cenderung tidak masuk kantor.

2. Pengertian Peran

Peran berarti laku, bertindak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. (www.kamus_bahasa_indonesia.org, diunduh 27 September 2013). Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama, penjelasan *histories*. Menurut penjelasan *histories*, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Menurut Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Dari penjelasan teori diatas, peran HPMM Cabang Alla adalah bagaimana melaksanakan fungsi organisasi sebagai penyalur atau penyambung aspirasi dan harapan-harapan masyarakat terhadap kontrol di pemerintahan.

3. Organisasi HPMM (Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu)

a. Sejarah Lahirnya/Berdirinya

Di tahun 1928 sumpah pemuda hadir sebagai medium pemuda dan pelajar seluruh Indonesia ikut andil merebut kekuasaan. Kebangkitan spirit pada waktu itu dibuktikan dengan lahirnya kelompok-kelompok pelajar dan pemuda mengorganisir diri sebagai bagian dari instrumen dan alat pergerakan. Djong Celebes, Djong Java, Papua dan beberapa organ dari daerah hadir dalam proses perjuangan. Begitupun dari tokoh-tokoh pemuda dan pelajar dari Massenrempulu yang terhimpun dalam sebuah gerakan merebut kemerdekaan.

Puncak perjuangan pemuda dan pelajar pada tahun 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan proses selanjutnya adalah proses mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pasca kemerdekaan pemuda dan pelajar dari seluruh Indonesia masing-masing membuat dan menyatukan dirinya dalam sebuah lembaga yang terorganisir sebagai upaya untuk mengisi kemerdekaan. Pemuda dan pelajar mahasiswa

Massenrempulu ikut andil dalam mengorganisir diri. Dalam fase kesejarahan itulah maka pada tanggal 14 Oktober 1946 lahirlah Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) di Makassar.

HPMM didirikan pertama kali oleh mereka yang dikemudian hari menjadi tokoh-tokoh besar Massenrempulu yaitu:

- 1) H.M. Fadeli Luran
- 2) Drs.H.M. Riza
- 3) H. Rasyid Ali, dan
- 4) Drs.H.M. Thala.

Selanjutnya, berturut-turut ketua HPMM pusat dijabat oleh:

- 1) H. Rasyid Ali (1946–1948)
- 2) Drs. H. Muh. Dahri (1948–1950)
- 3) Drs. H.M. A. Mannan Tuppu (1950–1952)
- 4) Bone Kosong (1952–1954).

Namun tidak banyak informasi yang diketahui dari para *the founding father* dan pendahulu HPMM sebelumnya.

Informasi tentang kiprah HPMM baru mulai agak terkuak pada periode Bapak SA. Maraoni, Dr. H. Syahban Liba, SH dan H. Muh. Mukhtar Roe (1959 – 1969). Hal itu pun karena pelaku-pelaku sejarah HPMM pada waktu itu umumnya masih hidup. HPMM pada periode ini tercatat banyak terlibat resolusi konflik TNI versus DI/TII di wilayah kabupaten Enrekang. HPMM beberapa kali berjasa menyelamatkan nyawa rakyat Massenrempulu pada masa konflik. Bahkan atas jasa HPMM sehingga konflik DI/TII dan TNI bisa diakhiri.

Asrama HPMM Pertama di Jl. Monginsidi juga mulai ada pada periode tersebut. Asrama itu didapatkan dengan cara pemotongan dana para mahasiswa Massenrempulu yang mendapatkan beasiswa daerah tertutup dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Pada periode HM. Lodi Sindangan, SH (1973 – 1981) yang menjadi catatan saya adalah Pembangunan Asrama HPMM di Jln. Perintis Kemerdekaan 7 Tamalanrea. Dana pembangunannya dari APBD kabupaten Enrekang atas inisiatif Bupati pada saat itu, Bapak H. Abdullah Dollar.

b. Maksud dan Tujuan

Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) sebagai bagian integral yang punya ikatan suci dengan masyarakat Massenrempulu secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum, menuntut HPMM senantiasa bersinergi dengan orientasi nilai dan cita-cita masyarakat itu sendiri yang menjadi cita-cita sosial HPMM. Cita-cita HPMM diyakini mampu mewujudkan tatanan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT, menuntut HPMM untuk menyadari akan hak dan kewajibannya.

Tujuan dasar HPMM, sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan usaha-usaha yang teratur, terencana dan berkesinambungan dalam sebuah sentuhan manajemen organisasi yang profesional. Implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah aktifitas kelembagaan merupakan penentu utama bagi tercapainya tujuan organisasi. Oleh sebab itu, kemampuan personal pengurus organisasi dalam *planning, organizing, actuating* dan *controlling*

sebagai sebuah bangunan sistem yang harus tercipta dalam mengawal perjalanan roda organisasi.

Perumusan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) secara makro ini dilakukan sebagai upaya memberi solusi alternatif terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi. Dengan demikian menjadi syarat mutlak bahwa proses rekayasa dalam rangka perumusan kebijakan umum program harus dimulai dan disusun dengan senantiasa secara cermat, cerdas dan penuh kearifan melakukan inventarisasi terhadap berbagai indikasi, baik makro maupun mikro yang mencerminkan kondisi realitas yang sedang melingkupi organisasi sampai hari ini. Diharapkan bahwa rumusan GBHO mampu menjadi haluan yang jelas secara garis besar dalam memaksimalkan fungsi dan peran HPMM melalui realisasi program kerja pada seluruh level struktur pimpinan HPMM secara terarah, terukur, terpadu, dan berkesinambungan.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran inilah, disusun arah penyelenggaraan roda organisasi dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), yang memuat konsepsi penyelenggaraan organisasi secara menyeluruh untuk membangun tatanan pencapaian tujuan organisasi, serta mewujudkan kemajuan disegala bidang yang akan menempatkan organisasi pada jenjang kedewasaan, kokoh dan kuat serta profesionalisme. Oleh sebab itu, kemampuan personalia pengurus organisasi dalam *planning, organizing, actuating* dan *controlling* sebagai sebuah bangunan sistem merupakan keharusan yang harus tercipta dalam mengawal perjalanan roda organisasi.

Planning organisasi sebagai sebuah tahapan awal yang harus dilakukan dalam perjalanan organisasi hendaknya dirumuskan secara utuh dengan senantiasa memperhatikan seluruh sisi dan aspek organisasi dengan segala peluang dan keterbatasan yang dimiliki oleh organisasi. Untuk itu, *planning* organisasi yang dirumuskan diatas seluruh bangunan asumsi sebagai sebuah hasil pembacaan terhadap realitas yang melingkupi organisasi tersebut.

Adapun sisi lain dari manajemen organisasi adalah *organizing* atau pengorganisasian seluruh elemen dalam sebuah organisasi. Penciptaan beberapa elemen struktur dalam sebuah organisasi harus senantiasa mempertimbangkan bagaimana, sehingga elemen-elemen struktur dalam organisasi tersebut dapat mendukung terciptanya kultur dan mekanisme kerja organisasi yang efektif. Dalam rangka menciptakan efektifitas kerja dari seluruh elemen struktur dalam sebuah sistem dan mekanisme kerja antara elemen struktur organisasi tersebut secara profesional dan proforsional.

Demikian halnya dengan proses *actuating* atau proses realisasi program kerja organisasi oleh seluruh elemen struktur dalam organisasi tersebut hendaknya ditata dalam sebuah manajemen kerja dengan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan secara jelas dan betul-betul mencerminkan sebuah sistem kerja organisasi. Dalam menjamin terlaksananya program secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan sebelumnya, maka *controlling* merupakan bagian yang urgen sebagai kerangka sistem kerja organisasi yang tak dapat dipisahkan dengan bagian lainnya. Organisasi HPMM adalah wadah yang memungkinkan

masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri.

Organisasi adalah perserikatan orang, yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja di mana pekerjaan dibagi menjadi rincian tugas, diberikan di antara pemegang peranan, dan kemudian digabung ke beberapa bentuk hasil (Sutarto, 2006 : 36). Dari berbagai pendapat tentang pengertian organisasi tersebut maka dapat disimpulkan adanya tiga macam pendapat yaitu: (1) Organisasi adalah kumpulan orang-orang; (2) Organisasi adalah proses pembagian kerja; dan (3) Organisasi adalah sistem kerja sama. Menurut Khaerul Umam (2010), Organisasi adalah perpaduan secara sistematis bagian-bagian yang saling bergantung atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Siswanto (2007 : 73) “Organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama”. Berdasarkan pendapat Siswanto tersebut, bahwa organisasi adalah interaksi antara sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu, setiap organisasi harus mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda-beda. Tujuan organisasi hendaknya dihayati oleh seluruh anggota organisasi sehingga setiap anggota diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui partisipasi mereka secara individual. Tujuan organisasi adalah yang paling penting dan sangat kontroversial dalam mempelajari organisasi.

Tujuan merupakan titik sentral petunjuk dalam organisasi. Tujuan sebagai suatu konsepsi akhir yang diinginkan atau kondisi yang partisipan akan mempengaruhi melalui penampilan aktivitas-aktivitas organisasi.

c. Manfaat

Mengikuti atau menjadi bagian dari sebuah organisasi mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan, karena dalam sebuah organisasi bisa di ibaratkan sebagai masyarakat dalam lingkup kecil. Selalu ada masalah yang perlu dipecahkan bersama, sikap saling menjaga dan bertanggung jawab terhadap keutuhan anggota atau pun mempertahankan sebuah kelompok, memberikan gambaran sebuah perjuangan panjang, dan ini akan sangat membantu ketika dalam penyelesaian masalah atau memberikan masukan kepada masyarakat dalam lingkup luas. Saat terlibat dalam organisasi, tentunya banyak hal yang mesti dikerjakan yang mau tak mau akan berinteraksi dengan banyak orang. Mereka yang aktif dalam organisasi akan sering terlatih mengungkapkan argumen di depan orang lain maupun mengarahkan anggota ketika menggelar sebuah acara. Ketika mencari pekerjaan maka kemampuan *leadership* tentu berguna sekali. Acap kali sejumlah lowongan mensyaratkan jiwa kepemimpinan menjadi bagian syarat yang harus dipenuhi kendati pada level staf yang sebetulnya tak mempunyai anak buah.

Oleh sebab itu, HPMM menjadi wadah membina pelajar dan mahasiswa Massenrempulu dalam mengembangkan potensi, kreatifitas, keilmuan, ekonomi produktif dan sosial budaya. Berperan aktif dalam dunia pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan untuk mendorong pembangunan daerah pada khususnya dan

pembangunan nasional pada umumnya. Bagi masyarakat Massenrempulu, HPMM adalah agen untuk menyampaikan isu-isu, keluhan dan aspirasi yang ada di masyarakat kepada pemerintah kabupaten Enrekang

d. Peran Strategis

Untuk mengimplementasikan hak-hak, peran dan tanggung jawan HPMM, maka HPMM mesti mengambil peran-peran perjuangan di tengah-tengah masyarakat. Hadirnya HPMM di tengah-tengah masyarakat sebagai bukti bahwa HPMM berangkat dari rahim rakyat. Fakta-fakta yang terjadi dalam realitas kemasyarakatan kita bahwa hak-hak masyarakat terkait dengan hak-hak pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan politik. Terkadang dalam proses implementasi masih butuh kerjasama dan penguatan dari semua elemen yang ada.

Untuk mewujudkan peran HPMM dalam proses perjuangan menuju cita-cita idealnya, maka HPMM dituntut untuk menjalankan fungsinya. Kehadiran kader adalah sebuah kemestian suatu hal yang mutlak. Maka fungsi HPMM sebagai organisasi pengkaderan adalah kebutuhan organisasi dan masyarakat. HPMM sepenuhnya menyadari bahwa cita-cita ideal dari lahirnya oerorganisasi hanya dapat diraih dengan usaha-usaha teratur, terencana dengan penuh kebijaksanaan.

4. Mengawal Kinerja Pemerintah

Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara, maka HPMM cabang Alla melakukan peranan Dalam mengawal kinerja pemerintah kabupaten Enrekang diranah sosial yaitu program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Enrekang, merupakan bentuk dari

kesadaran partisipasi HPMM dalam pembangunan. Pada awalnya fungsi yang diperankan oleh HPMM adalah melakukan kontrol sosial serta membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pembangunan. Peran HPMM dalam pemberdayaan masyarakat adalah fasilitator yaitu melakukan persiapan masyarakat, menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah, dengan demikian konflik dapat terdeteksi lebih awal. Peran lainnya adalah advokasi (*advocacy*) mengkaji isu-isu sosial di masyarakat yang di maksud adalah keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, ditujukan sebagai korelasi atas penyimpangan-penyimpangan. Sedangkan misi pokoknya bagaimana membuat masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri dan tidak menyerahkan semuanya untuk diurus oleh pemerintah. Artinya HPMM menjadi penyambung aspirasi dan keluhan masyarakat.

Dalam rangka mempertegas eksistensi organisasi HPMM sebagai salah satu lembaga kemahasiswaan yang representatif untuk mewadahi seluruh pelajar dan mahasiswa Massenrempulu, maka hal yang paling strategis untuk dilakukan adalah dengan mempertegas peran dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi HPMM. Berkenaan dengan itu, HPMM akan senantiasa dituntut untuk melakukan pembenahan secara internal organisasi melalui upaya pematapan dan penanganan proses pengkaderan secara profesional dalam rangka menciptakan kader-kader HPMM yang memiliki komitmen dan integritas yang mantap, yang pada gilirannya kader-kader tersebut akan memiliki kesiapan baik secara mental maupun konsepsional dalam rangka mendorong dan mewarnai proses dinamisasi peran di HPMM, masyarakat dan pemerintahan.

Pada saat yang bersamaan pula HPMM diperhadapkan pada sebuah keharusan organisatoris sebagai sebuah organisasi yang pada pundaknya melakukan tanggung jawab sosial untuk turut memainkan peran-peran strategis dalam menentukan masa depan Massenrempulu kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu, dalam momentum musyawarah besar sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi menetapkan beberapa rekomendasi organisasi baik untuk lingkup internal maupun eksternal organisasi sebagai salah satu bentuk penjabaran dari *strong point* kebijakan organisasi yang harus segera direalisasikan dalam waktu dekat demi menjawab beberapa kebutuhan mendasar organisasi secara khusus dan aspirasi masyarakat Massenrempulu secara umum.

a. Dasar Pemikiran

Pelajar dan mahasiswa adalah bagian dari generasi muda Indonesia dan generasi Islam, sadar akan hak dan kewajiban kepada masyarakat, bangsa dan agama sehingga bertekad untuk mendarma baktikan segenap potensi yang dimiliki. Niat suci tersebut kemudian terlembagakan dalam sebuah wadah perjuangan yang terorganisir dengan senantiasa mengedepankan semangat kekeluargaan dalam pembangunan pribadi-pribadi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dengan tetap menjadikan Al-Qur'an dan As sunnah sebagai pedoman hidup.

Tujuan dasar organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan usaha-usaha yang teratur, terencana dan berkesinambungan dalam sebuah

sentuhan manajemen organisasi yang profesional. Implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah aktifitas kelembagaan merupakan penentu utama bagi tercapainya tujuan organisasi. Oleh sebab itu, kemampuan personal pengurus organisasi dalam *planning, organizing, Actuating* dan *Controlling* sebagai sebuah bangunan sistem merupakan keharusan yang harus tercipta dalam mengawal perjalanan roda organisasi.

Perumusan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) secara makro ini dilakukan sebagai upaya memberi solusi alternatif terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi. Dengan demikian menjadi syarat mutlak bahwa proses rekayasa dalam rangka perumusan kebijakan umum program harus dimulai dan disusun dengan senantiasa secara cermat, cerdas dan penuh kearifan melakukan inventarisasi terhadap berbagai indikasi baik makro maupun mikro yang mencerminkan kondisi realitas yang sedang melingkupi organisasi sampai hari ini. Diharapkan bahwa GBHO mampu menjadi haluan yang jelas secara garis besar dalam memaksimalkan fungsi dan peran HPMM melalui realisasi program kerja pada seluruh level struktur pimpinan HPMM secara terarah, terukur, terpadu, dan berkesinambungan. Dengan mengacu pada dasar pemikiran inilah, disusun arah penyelenggaraan roda organisasi dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), yang memuat konsepsi penyelenggaraan organisasi secara menyeluruh untuk membangun tatanan pencapaian tujuan organisasi, serta mewujudkan kemajuan disegala bidang yang akan menempatkan organisasi pada jenjang kedewasaan, kokoh dan kuat, serta profesionalisme.

b. Pengertian

- 1) GBHO adalah pokok-pokok kebijakan segala bidang dalam rangka melakukan perubahan yang mengarah kepada pembaharuan peningkatan dan penyempurnaan terhadap kultur pengkaderan dan perjuangan HPMM menuju pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan oleh musyawarah besar.
- 2) GBHO merupakan haluan pengkaderan dan perjuangan organisasi sebagai bentuk garis-garis pernyataan kehendak seluruh peserta musyawarah besar.
- 3) GBHO merupakan serangkaian program pengkaderan dan perjuangan organisasi yang bersifat holistik, terarah, terpadu dan berkesinambungan.
- 4) GBHO merupakan serangkaian tangga yang harus dilalui dalam mencapai tujuan organisasi

c. Modal Dasar

Modal dasar sebagai potensi yang dimiliki HPMM dalam memaksimalkan realisasi program kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Latar belakang kelahiran HPMM dan sejarah perkembangan sebagai organisasi pelajar dan mahasiswa yang menghimpun pelajar dan mahasiswa Massenrempulu yang telah memberikan kontribusi bagi proses perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI.
- 2) Mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta bersama seluruh lapisan masyarakat Massenrempulu berpartisipasi dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bumi Massenrempulu dengan senantiasa mengedepankan nilai-nilai luhur budaya Massenrempulu.

- 3) Status dan kedudukan HPMM berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 28).
- 4) Pilihan Islam sebagai asas yang dianut dalam organisasi ini merupakan totalitas konsep nilai paripurna dan dijadikan sebagai sumber inspirasi, inovasi dan motivasi. Sekaligus menjadikan tujuan akhir yang ingin dicapai dan diperjuangkan oleh seluruh anggota HPMM.
- 5) Potensi alumni HPMM yang tersebar diberbagai sektor masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam mendukung perjuangan HPMM dalam mencapai tujuan. Program kerja yang secara umum yang dalam penjabaran pelaksanaannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dilingkungan pada level pimpinan masing-masing. Oleh karena itu, hendaknya penjabaran pelaksanaan program kerja HPMM dalam satu periode kepengurusan harus berarti, bila hal ini dilaksanakan secara baik, maka dengan sendirinya landasan positif bagi pelaksanaan program kerja pada periode-periode selanjutnya. Sebagai konsekuensi logis, maka penyesuaian-penyesuaian antisipasi yang tepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sangat diperlukan sehingga pelaksanaan program kerja pada dasarnya merupakan jawaban terhadap tuntutan-tuntutan.

Untuk selanjutnya, agar rumusan program kerja lebih bersifat teknis dan operasional maka dijabarkan lebih jauh dalam rapat kerja ataupun rapat koordinasi. Ditingkat Pengurus Pusat (PP-HPMM) disusun program kerja secara lokal dan regional dalam upaya partisipasi pembangunan daerah kab. Enrekang,

ditingkat cabang disusun program kerja sesuai dengan wilayah kecamatan masing-masing, ditingkat komisariat dan koordinator wilayah (Korwil) disusun program kerja yang lebih bersifat akademik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjabaran program kerja adalah (1.) Adanya konsistensi terhadap misi organisasi (2) Adanya kesinambungan persepsi dan program organisasi (3) Adanya pertimbangan situasi, kondisi, potensi dan masalah lingkungan (4) Adanya pertimbangan implikasi terhadap mekanisme organisasi dalam pelaksanaan program kerja.

d. Rapat Kerja

Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris pengurus pusat untuk tingkat pusat, pengurus cabang untuk tingkat cabang, pengurus komisariat untuk tingkat komisariat dan pengurus koordinator wilayah untuk tingkat koordinator wilayah. Rapat kerja dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu periode yang dilaksanakan pada awal kepengurusan. Fungsi dan wewenang rapat kerja adalah menyusun jadwal aktifitas/rencana kerja kepengurusan untuk satu periode dan menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk semua agenda kegiatan selama satu periode.

e. Komposisi dan Ruang Lingkup

1. Formasi Umum Kepengurusan

Formasi umum kepengurusan untuk setiap level struktur pimpinan HPMM sekurang-kurangnya terdiri dari ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum yang masing-masing harus memiliki minimal 2 orang staf.

2. Formasi Kepengurusan Lanjutan

Formasi kepengurusan lanjutan yang dimaksud adalah formasi kepengurusan pada level struktur pimpinan HPMM dibawah pengurus pusat. Pada struktur pimpinan dibawah pengurus pusat formasi kepengurusannya ditentukan berdasarkan kebutuhan masing-masing struktur pimpinan dengan tetap mengacu pada GBHO dan ruang lingkup garapan dari masing-masing struktur pimpinan.

f. Tugas dan Fungsi Pengurus

Tugas pengurus pada setiap level struktur pimpinan HPMM adalah melaksanakan seluruh keputusan yang telah digariskan dan diamanahkan oleh forum pemegang kekuasaan pada masing-masing level struktur pimpinan HPMM. Sedangkan fungsi pengurus adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan seluruh program kerja organisasi serta bertanggung jawab dalam mewujudkan dinamisasi dan stabilitas perjalanan roda organisasi.

g. Struktur Personalia Pengurus

Struktur personalia pengurus dalam setiap struktur pimpinan HPMM lebih diarahkan sebagai sebuah proses organisasi dalam rangka pendesentralisasian kekuasaan organisasi. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mendorong partisipasi seluruh komponen organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara umum dan pencapaian target kepengurusan pada suatu periode kepengurusan. Penyusunan formasi umum kepengurusan pada setiap level struktur organisasi disesuaikan dengan kebututhan masing-masing struktur pimpinan yang dijabarkan ke dalam sejumlah bidang yang penetapannya mengacu pada Garis-garis Basar Haluan Organisasi (GBHO). Khusus untuk formasi kepengurusan ditingkat

pengurus pusat atau pengurus besar, maka formasinya ditetapkan melalui musyawrah besar dan memungkinkan untuk dilakukan peninjauan pada sidang pleno pengurus pusat HPMM.

h. Ruang Lingkup Pelaksanaan Program

1. Pengurus Pusat HPMM (PP-HPMM)

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada tingkat pengurus pusat lebih mengendenpenkan pada sisi perencanaan, pengembangan peran dan fungsi organisasi, pengembangan konsep-konsep pedoman organisasi, pengembangan jaringan eksternal dan pembentukan institusi kantong yang berskala nasional. Pembinaan organisasi dalam skala nasional dan penentuan kebijakan strategis organisasi baik internal maupun eksternal dalam skala nasional serta penyediaan *data base* organisasi. Dalam konteks mekanisme kerja organisasi, pengurus pusat merupakan induk dan sentral pengambilan kebijakan organisasi yang bersifat umum dan mencakup skala secara nasional. Untuk itu seluruh kebijakan yang diambil oleh pengurus pusat selanjutnya didelegasikan kepada seluruh level struktur pimpinan HPMM di bawah pengurus pusat HPMM untuk dilaksanakan dengan memperhatikan fokus garapan pada *local contect* masing-masing level struktur pimpinan HPMM.

2. Pengurus Cabang

Pengurus Cabang dalam melaksanakan aktifitas organisasinya, harus merujuk pada pola umum kebijakan program kerja pengurus pusat sebagai penerjemahan secara operasional dari GBHO. Proses operasionalisasi kebijakan umum PP-HPMM dalam bentuk program kerja di tingkat cabang harus

disesuaikan dengan kultur pada masing-masing *local context* cabang yang bersangkutan. Secara spesifik fokus garapan pengurus cabang meliputi, penguatan kapasitas intelektual kader, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, pengawalan pemerintah lokal masing-masing cabang, penelitian dan pengembangan aspek sosial, ekonomi rakyat serta budaya.

3. Pengurus Komisariat

Pengurus komisariat dalam menjalankan aktifitas organisasinya harus merujuk pada pola umum kebijakan program kerja pengurus pusat atau pengurus besar sebagai penerjemahan secara operasional dari GBHO. Proses operasionalisasi kebijakan umum PP-HPMM dalam bentuk program kerja di tingkat komisariat harus disesuaikan dengan kultur pada masing-masing *local context* komisariat yang bersangkutan. Secara spesifik fokus garapan pengurus komisariat meliputi penguatan kapasitas intelektual kader, Pengembangan jaringan lembaga kemahasiswaan, pengkajian berbagai metode pembangunan kedaerahan.

4. Pengurus Koordinator Wilayah (Korwil)

Pengurus koordinator wilayah (korwil) dalam melaksanakan aktifitas organisasinya harus merujuk pada pola umum kebijakan program kerja pengurus pusat atau pengurus besar sebagai penerjemahan secara operasional dari GBHO. Proses operasional kebijakan umum PP-HPMM dalam bentuk program kerja di tingkat koordinator wilayah harus disesuaikan dengan kultur pada masing-masing *local context* koordinator wilayah yang bersangkutan. Secara spesifik fokus garapan pengurus koordinator wilayah meliputi penguatan kapasitas intelektual kader, pengembangan jaringan lembaga kemahasiswaan di tingkat wilayahnya.

5. Tata Kerja Badan-Badan Organisasi

Tata kerja badan-badan HPMM merupakan penjabaran dan pengembangan dari amanah kekuasaan musyawarah besar, musyawarah cabang, musyawarah komisariat dan musyawarah koordinator wilayah. Tata kerja badan-badan HPMM direncanakan dan dilaksanakan dengan sebuah pendekatan manajemen organisasi yang rapi dan sampai pada evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan untuk kebutuhan perbaikan dan penyempurnaan jalannya roda organisasi.

6. Kepanitiaan

Dalam melaksanakan kerja-kerja kepengurusan dalam jangka pendek, maka pengurus pada setiap level struktur pimpinan termasuk pada level pimpinan pembantu HPMM dapat membentuk kepanitiaan yang dapat meliputi panitia pengarah (*steering committee*) dan Panitia teknis (*Organizing committee*).

7. Evaluasi Kinerja organisasi

Dalam rangka melakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, maka diperlukan indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator-indikator tersebut merupakan rujukan dalam melakukan evaluasi kinerja organisasi-organisasi.

5. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah

provinsi. Daerah provinsi itu di bagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.
- c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hak dan kewajiban pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem

pengelolaan keuangan daerah. Urusan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi semua urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

6. Landasan Teori Sosiologi

Beberapa karakteristik dari kelompok sosial, yaitu nilai-nilai kelompok, norma-norma kelompok, peran dan posisi, serta status dan ikatan kelompok, sedangkan tipe-tipe kelompok sosial mencakup *in-group* dan *out-group*, kelompok primer dan kelompok sekunder, serta kelompok formal dan kelompok informal. Pada kelompok informal terdapat juga beberapa bentuk ikatan, antara lain kelompok persahabatan atau persaudaraan, dan klik. Klik ini juga terdiri dari klik vertikal, klik horizontal, klik campuran, serta subklik.

Kesamaan karakteristik mengenai fenomena organisasi biasanya selalu dijadikan dasar dalam menentukan tipologi atau klasifikasi fenomena organisasi. Tipologi atau klasifikasi tersebut mencakup, antara lain organisasi yang bergerak berdasarkan keuntungan, sistem wewenang, tanggapan anggota, keterlibatan emosi anggota, tujuannya, kebutuhan sosial, pembagian biaya dan nilai, luas wilayah, pucuk pimpinan, dan saluran wewenang. Di dalam organisasi formal terdapat organisasi informal. Berkembangnya organisasi informal ini karena

struktur formal tidak dapat memberikan pemenuhan kebutuhan para anggotanya dan juga kebutuhan organisasi (formal) itu sendiri. Keduanya yaitu organisasi formal dan organisasi informal memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal tujuannya, mekanisme kontrol, karakteristik dan sebagainya.

Di dalam organisasi formal, birokrasi merupakan salah satu bentuk yang sering kali memiliki konotasi negatif hanya karena ketidaktahuan konsep awal birokrasi oleh masyarakat. Max Weber, seorang sosiolog Jerman, melihat birokrasi yang ideal itu memiliki beberapa sifat, yaitu: (1) adanya pembagian kerja; (2) hierarki otoritas; (3) sistem pemeliharaan dokumen tertulis dan formal; (4) pengaturan, tata cara dan aturan; (5) tenaga ahli terlatih; (6) hubungan yang impersonal. Menurut teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis merupakan tujuan organisasi. Teori ini juga menyatakan bahwa manusia itu diasumsikan bertindak rasional sehingga secara rasional dengan menaikkan upah, produktivitas akan meningkat. Max Weber dengan konsep birokrasi idealnya menekankan pada konsep otoritas dan kekuasaan yang sah untuk melakukan kontrol kepada pihak lain yang berada di bawahnya sehingga organisasi akan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakefisienan.

B. Kerangka Konsep

Kerangka pikir merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep yang terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengabstraksikan unsur-unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Kerangka berpikir

berfungsi untuk memahami alur pemikiran secara cepat, mudah dan jelas. Bagan kerangka pikir dibawah ini menggambarkan bagaimana peran HPMM Cabang Alla dalam mengawal (kinerja) pemerintah di Kabupaten Enrekang. HPMM Cabang Alla adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Massenrempulu yang mana memiliki maksud dan tujuan sebagai bagian integral yang punya ikatan dengan masyarakat Massenrempulu untuk melaksanakan peran dan fungsi organisasi dalam bentuk mengawal kinerja pemerintah di Kabupaten Enrekang sehingga apa yang menjadi cita-cita masyarakat dapat terwujud.

Untuk mempermudah penjelasan, maka dapat di gambar melalui kerangka pikir di bawah ini :

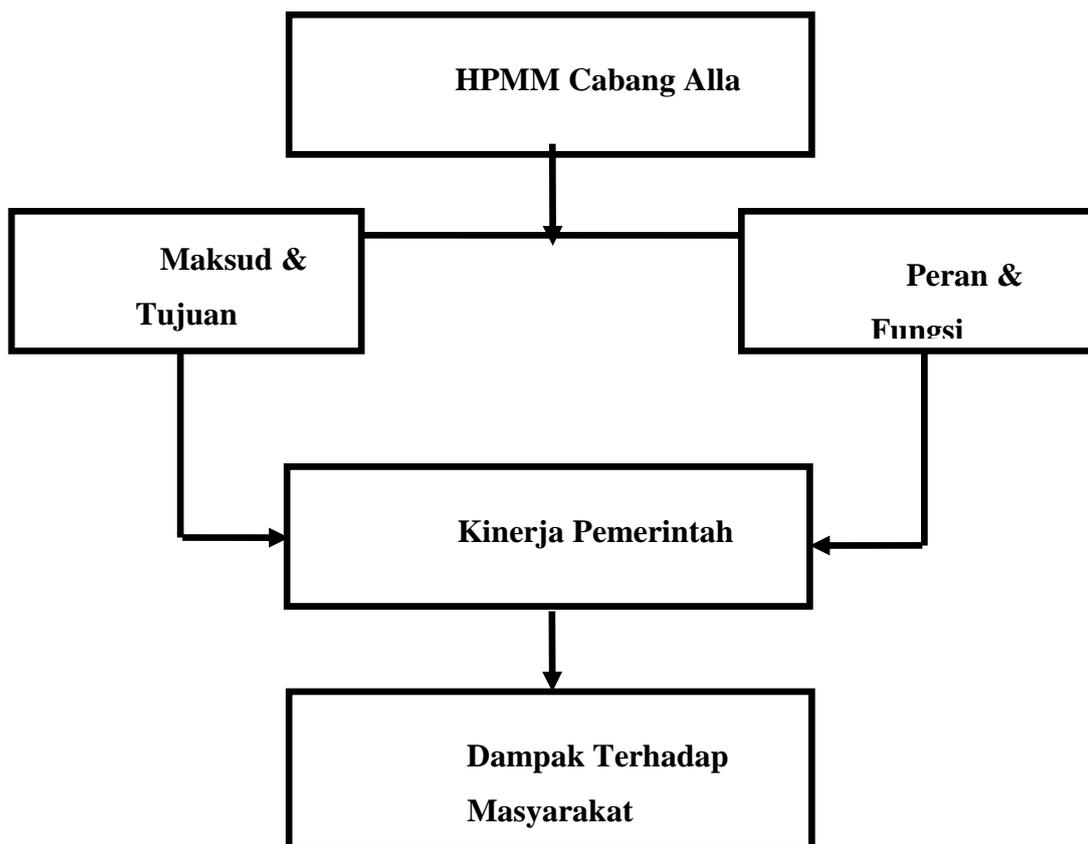


Diagram 2.1 Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku, dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Metode penelitian kualitatif ini juga sering disebut metode penelitian *naturalistic*, karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah, (*natural setting*), (Sugiyono 2013: 8-9).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas obyek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas dengan alasan lokasi ini sangat sesuai dengan target penelitian karena cakupan HPMM Cabang Alla berada pada wilayah Kecamatan Alla.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus HPMM Cabang Alla, masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Untuk mendapatkan data primer, peneliti memilih informan secara sengaja atau

proposive sampling, berdasarkan pada kriteria atau karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut dengan karakteristik yang sudah diketahui sebelumnya dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Adapun pembagian informan sebagai berikut:

1. Tokoh/Pengurus HPMM Cabang Alla sebagai pengawal (3 orang)
2. Unsur pemerintah sabagai yang dikawal (2 orang)
3. Masyarakat sebagai penikmat (5 orang)

D. Fokus Penelitian

Spradley (Sugiyono, 2013: 208) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi fokus atau titik perhatian penelitian adalah Peran HPMM Cabang Alla dalam Mengawal (Kinerja) Pemerintah di Kabupaten Enrekang.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis itu secara teknis biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non kognitif, (Suryabrata, 2008: 52). Untuk atribut kognitif, perangsangnya adalah pertanyaan. Sedangkan untuk atribut non-kognitif, perangsangnya adalah pernyataan.

(<http://yusrizalfirzal.wordpress.com/tag/pengertian-instrumen-penelitian>).

Diakses pada tanggal 27 Mei 2016: 17.07)

Istrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, maka peneliti mulai tahap awal penelitian sampai pada hasil penelitian ini seluruhnya dilakukan oleh peneliti.

Selain itu, untuk mendukung tercapainya hasil penelitian maka peneliti menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen observasi adalah catatan dan lembar observasi. Sedangkan instrumen wawancara adalah buku catatan atau *notebook*, *tape recorder* (perekam) atau *handphone* dan *camera* serta pedoman wawancara.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan dari informan utama yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dengan narasumber yang akan diwawancarai berisi pertanyaan tentang Peran HPMM Cabang Alla dalam Mengawal (Kinerja) Pemerintah di Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Merupakan data pelengkap yang didapatkan dari laporan- laporan instansi yang terkait dengan penelitian ini, sumber bisa berupa buku, data statistik dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Bungin (2007: 115) mengemukakan Observasi langsung dilakukan dengan observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.

Observasi langsung ini akan dilakukan dengan cara formal dan informal, untuk mengamati berbagai kegiatan masyarakat dan bentuk-bentuk partisipasi mereka dalam pelaksanaan program itu. Observasi tersebut dapat terbentang mulai dari kegiatan pengumpulan data yang formal hingga yang tidak formal. Bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang topik yang akan diteliti. Observasi dapat menambah dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang akan diteliti. Observasi tersebut bisa begitu berharga sehingga peneliti bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus untuk menambah keabsahan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian (Emzir, 2010: 50).

Wawancara bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah pada kedalaman informasi. Dalam hal ini, peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Dalam berbagai situasi, peneliti dapat meminta responden untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan dapat menggunakan posisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya.

Kelebihan mencari data dengan cara wawancara, dapat diperoleh keterangan yang tidak dapat diperoleh dengan metode yang tidak menggunakan hubungan yang bersifat personal. Semakin bagus pengertian pewawancara dan semakin halus perasaan dalam pengamatannya itu, semakin besar pulalah kemampuannya untuk memberikan dorongan kepada subjeknya. Lagi pula, semakin besar kemampuan orang yang diwawancarai untuk menyatakan responsnya, semakin besar proses intersimulasi itu. Tiap-tiap respons atau tanggapan yang verbal dan reaksinya dinyatakan dengan kata-kata dapat memberikan banyak pikiran-pikiran yang baru. Suatu jawaban bukanlah jawaban atas suatu pertanyaan saja, melainkan merupakan pendorong timbulnya keterangan lain yang penting mengenai peristiwa atau objek penelitian. Semakin besar bantuan responden dalam wawancara, maka semakin besar peranannya sebagai informan. Dalam hal ini, informan kunci seringkali sangat penting bagi keberhasilan studi kasus. Mereka tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber-sumber bukti lain yang mendukung serta menciptakan akses terhadap sumber yang

bersangkutan. Dengan demikian wawancara mendalam harus memberikan keleluasaan informan dalam memberikan penjelasan secara aman, tidak merasa ditekan, maka perlu diciptakan suasana “kekeluargaan”. Kelonggaran ini akan mengorek kejujuran informasi, terutama yang berhubungan dengan sikap, pandangan, dan perasaan informan sehingga pencari data tidak merasa asing dan di curigai.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tersebut merupakan data sekunder. Teknik dokumentasi atau penggunaan dokumen sebagai data penelitian juga memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya. Tidak semua kondisi dan kejadian (peristiwa) pada masa tertentu terekam secara indrawi dan seluruhnya mampu tersimpan dalam memori setiap orang. Karena itu, dokumen memegang peranan penting untuk penjaringan data terutama bagi peristiwa atau kejadian masa lampau.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen atau file-file dari instansi tertentu (data dari kantor kecamatan setempat) serta dokumentasi gambar saat peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Milles dan Huberman, yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif. Pertama reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data dari berbagai sumber data misalnya, dari catatan lapangan dokumen, arsip, dan sebagainya. Kedua, penyajian data, seperti merakit data dan menyajikan dengan baik supaya lebih mudah dipahami. Penyajian dapat berupa matriks, gambar, skema, table dan lain sebagainya. Ketiga, menarik kesimpulan/verifikasi, proses penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Secara skematis proses analisis interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut:

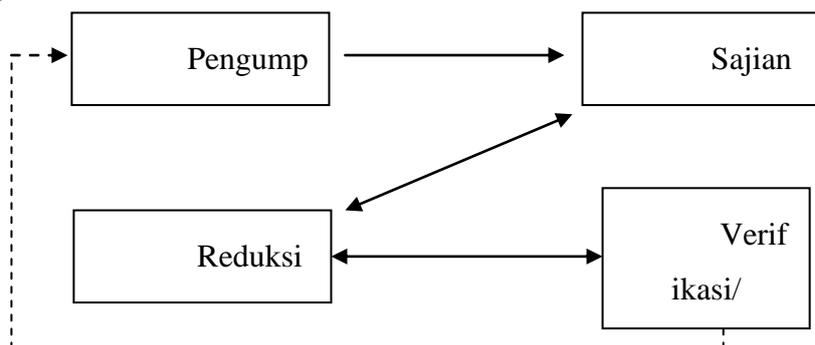


Diagram 3.1. Model Analisis Data Milles dan Huberman

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah teknik yang digunakan untuk meyakinkan *public*, masyarakat, audiens mengenai data yang didapatkan dapat dipercaya atau dipertanggung jawabkan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Teknik Meningkatkan Ketekunan

Menurut Sugiyono (2016 : 370-371) Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deksripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati,

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian ataupun dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini,

wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.

2. Teknik Triangulasi

Sugiyono (2016:372) berpendapat tentang triangulasi dalam pengujian keabsahan data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Misalnya peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak disebut triangulasi teknik atau triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari sumber yang berbeda, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan dari sumber tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau

kuesioner. Bila dengan tiga teknik keabsahan data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian adanya.

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.
- 3) Mengadakan perbincangan dengan banyak pihak untuk mencapai pemahaman tentang suatu atau berbagai hal.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Sugiyono (2016:375) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, *handycame*, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung keabsahan dat yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga lebih dapat dipercaya.

BAB IV

DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN DAN DESKRIPSI KHUSUS LATAR PENELITIAN

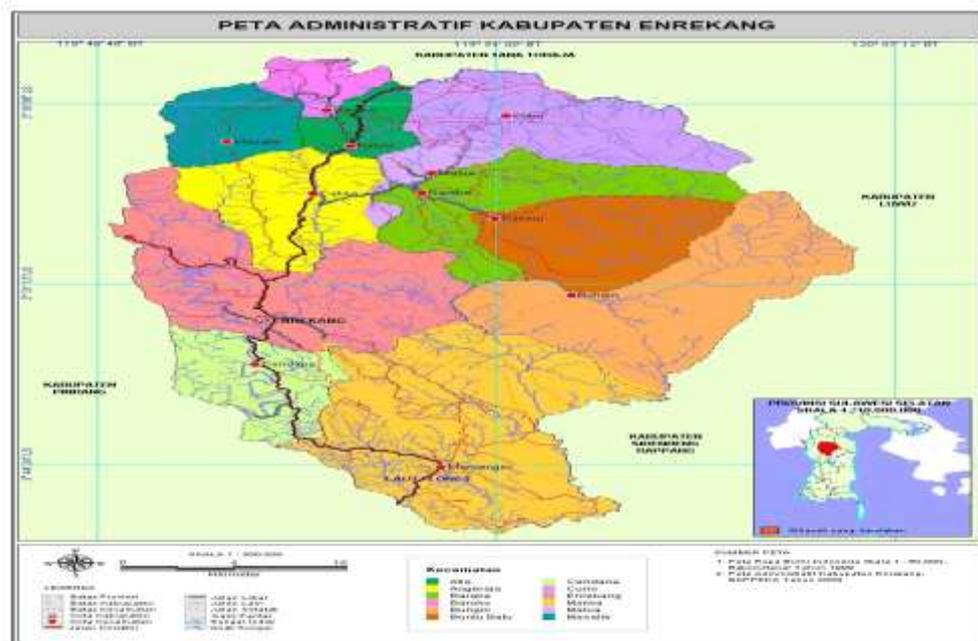
A. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang sebagai Tempat Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang berada di jantung Jasirah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Pegunungan Latimojong yang memanjang dari utara ke selatan rata-rata ketinggian ± 3.000 meter diatas permukaan laut, memagari Kabupaten Enrekang disebelah timur sedang disebelah barat membentang Sungai Saddang dari utara ke selatan yang pengendalian airnya menentukan pengairan saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai ke Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kabupaten Enrekang terletak antara $3^{\circ} 14'36''$ LS dan $119^{\circ}40'53''$ BT. Jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) ke kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km. Batas-batas daerah Kabupaten Enrekang : Sebelah Utara Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebelah Barat Kabupaten Pinrang, dan Sebelah Timur Kabupaten Luwu dan Sidenreng Rappang. Kabupaten Enrekang berada di daerah pegunungan, terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung menyambung, mengambil dari $\pm 85\%$ dari seluruh luas Kabupaten Enrekang yang luasnya $\pm 1.786,01$ Km atau 2,92 dari seluruh luas seluruh propinsi Sulawesi Selatan.

Iklim di Kabupaten Enrekang hampir sama dengan daerah lainnya di propinsi Sulawesi Selatan yaitu terbagi 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi/ berlangsung pada bulan November-Juli, sedangkan pada musim kemarau berlangsung pada bulan Agustus-Oktober. Jumlah hari hujan (HH) pada tahun 2001 139 dan curah hujan 3.970 mm, tahun 2002 jumlah HH 137 hari dan CH 1410 mm, tahun 2003 jumlah HH 82 CH 1925 mm.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Enrekang

Sumber: www.enrekangkab.go.id

Sejak abad XIV, daerah ini disebut 'MASSENREMPULU' yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari

ENDEG yang artinya NAIK DARI atau PANJAT dan dari sinilah asal mulanya sebutan ENDEKAN. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Administrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian.

Sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil \pm 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km². Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama MALEPONG BULAN, kemudian kerajaan ini bersifat MANURUNG dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi ”PITUE MASSENREMPULU”, yaitu:

1. Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan
2. Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa'
3. Kerajaan Batulappa' yang dipimpin oleh Arung Batulappa'
4. Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla' oleh Arung Alla'
5. Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa
6. Kerajaan Letta' yang dipimpin oleh Arung Letta'
7. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin

Pitu (7) Massenrempulu' ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV M. Tetapi sekitar pada abad ke XVII M, Pitu (7) Massenrempulu' berubah nama menjadi

Lima Massenrempulu' karena Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letta' tidak bergabung lagi ke dalam federasi Massenrempulu'. Akibat dari politik *Divide et Impera*, Pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya surat keputusan dari Pemerintah Kerajaan Belanda (*Korte Verking*), di mana Kerajaan Kassa dan kerajaan Batu Lappa' dimasukkan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan Lima Massenrempulu' tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang dipecah.

Beberapa bentuk pemerintahan di wilayah Massenrempulu' pada masa itu, yakni:

1. Kerajaan-kerajaan di Massenrempulu' pada Zaman penjajahan Belanda secara administrasi Belanda berubah menjadi Landshcap. Tiap Landschap dipimpin oleh seorang Arung (*Zelftbestuur*) dan dibantu oleh Sulewatang dan Pabbicara /Arung Lili, tetapi kebijaksanaan tetap ditangan Belanda sebagai Kontroleur. Federasi Lima Massenrempulu' kemudian menjadi: Buntu Batu, Malua, Alla'(Tallu Batu Papan/Duri), Enrekang (Endekan) dan Maiwa. Pada tahun 1912 sampai dengan 1941 berubah lagi menjadi Onder Afdeling Enrekang yang dikepalai oleh seorang Kontroleur (Tuan Petoro).
2. Pada zaman pendudukan Jepang (1941–1945), Onder Afdeling Enrekang berubah nama menjadi Kanrikan. Pemerintahan dikepalai oleh seorang Bunkem Kanrikan.
3. Dalam zaman NICA (NIT, 1946–27 Desember 1949), kawasan Massenrempulu' kembali menjadi *Onder Afdeling* Enrekang.

4. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960, Kawasan Massenrempulu' berubah menjadi Kewedanaan Enrekang dengan pucuk pimpinan pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (KPN Enrekang) yang meliputi 5 (lima) SWAPRAJA, yakni:
 - a. Swapraja Enrekang
 - b. Swapraja Alla
 - c. Swapraja Buntu Batu
 - d. Swapraja Malua
 - e. Swapraja Maiwa

Yang menjadi catatan atau lembaran sejarah yang tak dapat dilupakan bahwa dalam perjuangan atau pembentukan Kewedanaan Enrekang (5 Swapraja) menjadi Daswati Ii /Daerah Swantara Tingkat Ii Enrekang atau Kabupaten Massenrempulu'. (Perlu ingat bahwa yang disetujui kelak dengan nama Kabupaten Dati II Enrekang mungkin karena latar belakang historisnya).

Adapun pernyataan resolusi tersebut antara lain:

1. Pernyataan partai/ormas Massenrempulu' di Enrekang pada tanggal 27 Agustus 1956
2. Resolusi panitia penuntut Kabupaten Massenrempulu di Makassar pada tanggal 18 November 1956 yang diketuai oleh almarhum Drs. H.M. RISA
3. Resolusi HIKMA di Parepare pada tanggal 29 November 1956
4. Resolusi Raja-Raja (ARUM PARPOL/ORMAS MASSENREMPULU') di Kalosi pada tanggal 14 Desember 1956

2. Keadaan Geografis Dan Iklim

a. *Kondisi Geografis*

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Enrekang terbagi menjadi 12 kecamatan dan 129 Desa/Kelurahan yaitu Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla, Kecamatan Cendana, Kecamatan Malua, Kecamatan Bungin, Kecamatan Curio, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Massalle, Dan Kecamatan Baroko. Kecamatan yang memiliki wilayah terbesar yaitu Kecamatan Maiwa dengan luas wilayah 393 km² atau 22 %. sedangkan Kecamatan yang terkecil yaitu Kecamatan Enrekang dengan luas wilayah 29 km² atau 1,94 %.

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten

Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Kabupaten Enrekang, memberikan penjelasan bahwa secara geografis, Enrekang memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Enrekang yang berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan memiliki berbagai potensi alam seperti marmer, batubara, minyak dan gas bumi, batuan mineral, serta perikanan laut yang cukup besar.

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada $3^{\circ} 14' 36'' - 3^{\circ} 50' 00''$ LS dan $119^{\circ} 40' 53'' - 120^{\circ} 06' 33''$ BT dan berada pada ketinggian 442 m dpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 km². Kabupaten Enrekang berbatasan dengan :

1. Sebelah utara : Kabupaten Tana Toraja
2. Sebelah timur : Kabupaten Luwu
3. Sebelah selatan : Kabupaten Soppeng
4. Sebelah barat : Kabupaten Pinrang

b. Iklim

Kabupaten Enrekang mempunyai iklim yang hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November-Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus-Oktober. Enrekang

memiliki iklim yang tropis yang memiliki curah hujan yang signifikan. Iklim ini dianggap menjadi Af menurut klasifikasi iklim Koppen-Geiger.

Suhu rata-rata tahunan adalah 26.6 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah Timur dan sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada bagian Barat curah hujannya rendah.

Adapun Curah hujan di Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

- 1) Curah hujan antara 218 hari curah hujannya 3.456 mm, meliputi Kecamatan Anggeraja meliputi cendana, singki.
- 2) Curah hujan antara 208 hari dengan curah hujannya 2.531 mm, meliputi Kecamatan malua, salukanan, pendokesan bone-bone.
- 3) Curah hujan antara 167 hari dengan curah hujannya 2.611 mm, meliputi Kecamatan Alla, sudu, belajen, malele, bolang, kalosi.
- 4) Curah hujan di atas 200 hari meliputi Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Malua.

3. Kondisi Topografi, Geologi dan Hidrologi

a. Topografi

Kabupaten Enrekang dengan ibukota Enrekang terletak ± 235 Km sebelah utara Makassar. Secara administratif terdiri dari sepuluh Kecamatan, 12 Kelurahan dan 96 Desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km². Terletak pada koordinat antara 3o 14' 36" sampai 03o 50' 00" Lintang Selatan dan 119o 40' 53" sampai 120o 06' 33" Bujur Timur. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah

utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, sebelah selatan dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang.

Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 meter dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%.

b. Geologi

Kondisi fisik geologi Enrekang terletak diantara dua patahan naik yang berarah hampir Utara-Selatan berupa perbukitan kapur sangat terjal dari formasi makale yang terdapat pada bagian barat, dan perbukitan tinggi Gunung latimojong yang terdapat pada bagian timur daerah penyelidikan. Pada bagian tengah yaitu diantara kedua tinggian tersebut dapat aliran sungai yang umumnya mengalir anak-anak sungai dari arah Timur dan Timur Laut menuju kearah Selatan dengan pola aliran dendritik dan semi parallel menuju sungai utama yaitu sungai mataallo yang mengalir dari arah Utara ke Selatan. Umumnya aliran-aliran sungai yang terdapat di daerah tersebut dikontrol oleh adanya patahan-patahan naik dan mendatar.

c. Hidrologi

Potensi keterpadatan dari air permukaan sangat bergantung pada iklim, bentang alam, jenis sifat fisik batuan dan tanah, penggunaan lahan serta kondisi struktur geologi. Sungai utama di Kabupaten Enrekang, antara lain yaitu Sungai Saddang, sungai-sungai tersebut termasuk tipe sungai permanen (berair dan mengalir sepanjang tahun). Cabang-cabang sungai tersebut merupakan sungai-sungai kecil berair dan mengalir pada musim hujan yang disebut sungai intermitten, yaitu pada musim hujan kondisi aliaran air permukaan debitnya besar sedangkan pada musim kemarau dengan debit kecil sehingga kering.

Pola aliran sungai di Kabupaten Enrekang terdiri atas, pola aliran sungai radial, subdendrik dan multibasinal adalah sebagai berikut :

- a) Tipe aliran sungai radial terdapat pada lereng tenggara kompleks Gunung Api Lompobattang, mengalir pada batuan dasar batuan konglomerat, breksi vulkanik, dan endapan fluvia vulkanik.
- b) Tipe aliaran subdendrik menyebar di Bagian timur Kabupaten Enrekang dan mengalir pada batuan dasar Formasi Walanae, yaitu batuan napal, batu pasir, batu pasir tufaan, sifat fisik batuan tingkat kekerasan seragam dan terletak pada bentang alam dengan topografi bergelombang lemah.
- c) Tipe aliran multi basinal menyebar di bagian tenggara, yaitu di Kecamatan Alla dan Kecamatan Anggeraja, merupakan jenis pola pengaliran yang terletak pada batu gamping/batu kapur.

B. Deskripsi Khusus HPMM Cabang Alla Sebagai Latar Penelitian

1. Sejarah Singkat HPMM Cabang Alla

Di tahun 1928 sumpah pemuda hadir sebagai medium pemuda dan pelajar seluruh Indonesia ikut andil merebut kekuasaan. Kebangkitan spirit pada waktu itu dibuktikan dengan lahirnya kelompok-kelompok pelajar dan pemuda mengorganisir diri sebagai bagian dari instrumen dan alat pergerakan. Djong Celebes, Djong Java, Papua dan beberapa organ dari daerah hadir dalam proses perjuangan. Begitupun dari tokoh-tokoh pemuda dan pelajar dari Massenrempulu yang terhimpun dalam sebuah gerakan merebut kemerdekaan.

Puncak perjuangan pemuda dan pelajar pada tahun 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan proses selanjutnya adalah proses mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pasca kemerdekaan pemuda dan pelajar dari seluruh Indonesia masing-masing membuat dan menyatukan dirinya dalam sebuah lembaga yang terorganisir sebagai upaya untuk mengisi kemerdekaan. Pemuda dan pelajar mahasiswa Massenrempulu ikut andil dalam mengorganisir diri. Dalam fase kesejarahan itulah maka pada tanggal 14 Oktober 1946 lahirlah Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) di Makassar.

HPMM didirikan pertama kali oleh mereka yang dikemudian hari menjadi tokoh-tokoh besar Massenrempulu yaitu:

- 5) H.M. Fadeli Luran
- 6) Drs.H.M. Riza
- 7) H. Rasyid Ali, dan
- 8) Drs.H.M. Thala.

Selanjutnya, berturut-turut ketua HPMM pusat dijabat oleh:

- 5) H. Rasyid Ali (1946–1948)
- 6) Drs. H. Muh. Dahri (1948–1950)
- 7) Drs. H.M. A. Mannan Tuppu (1950–1952)
- 8) Bone Kosong (1952–1954).

Namun tidak banyak informasi yang diketahui dari para *the founding father* dan pendahulu HPMM sebelumnya.

Informasi tentang kiprah HPMM baru mulai agak terkuak pada periode Bapak SA. Maraoni, Dr. H. Syahban Liba, SH dan H. Muh. Mukhtar Roe (1959 – 1969). Hal itu pun karena pelaku-pelaku sejarah HPMM pada waktu itu umumnya masih hidup. HPMM pada periode ini tercatat banyak terlibat resolusi konflik TNI versus DI/TII di wilayah kabupaten Enrekang. HPMM beberapa kali berjasa menyelamatkan nyawa rakyat Massenrempulu pada masa konflik. Bahkan atas jasa HPMM sehingga konflik DI/TII dan TNI bisa diakhiri.

Asrama HPMM pertama di Jl. Monginsidi juga mulai ada pada periode tersebut. Asrama itu didapatkan dengan cara pemotongan dana para mahasiswa Massenrempulu yang mendapatkan beasiswa daerah tertutup dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Pada periode HM. Lodi Sindangan, SH (1973 – 1981) yang menjadi catatan saya adalah Pembangunan Asrama HPMM di Jln. Perintis Kemerdekaan 7 Tamalanrea. Dana pembangunannya dari APBD kabupaten Enrekang atas inisiatif Bupati pada saat itu, Bapak H. Abdullah Dollar.

2. Hubungan HPMM Cabang Alla dengan Pemerintah Kecamatan Alla

Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) sebagai bagian integral yang punya ikatan suci dengan masyarakat Massenrempulu secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum, menuntut HPMM senantiasa bersinergi dengan orientasi nilai dan cita-cita masyarakat itu sendiri yang menjadi cita-cita sosial HPMM. Cita-cita HPMM diyakini mampu mewujudkan tatanan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT, menuntut HPMM untuk menyadari akan hak dan kewajibannya.

Tujuan dasar HPMM, sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan usaha-usaha yang teratur, terencana dan berkesinambungan dalam sebuah sentuhan manajemen organisasi yang profesional. Implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah aktifitas kelembagaan merupakan penentu utama bagi tercapainya tujuan organisasi. Oleh sebab itu, kemampuan personal pengurus organisasi dalam *planning, organizing, actuating* dan *controlling* sebagai sebuah bangunan sistem yang harus tercipta dalam mengawal perjalanan roda organisasi.

Sedangkan Pengertian Pemerintahan Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kecamatan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dapat disimpulkan hubungan antara HPMM Cabang Alla dan pemerintahan Kecamatan Alla adalah suatu tempat dari komunitas masyarakat yang menetap pada wilayah

Enrekang secara Umum dan Kecamatan Alla secara Khusus untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan berkemajuan secara merata.

3. **Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Alla**

Dilihat dari tingkat pendidikan, maka penduduk Kecamatan Alla masih tergolong berpendidikan rendah, mungkin dikarenakan oleh kesadaran mereka terhadap pendidikan masih kurang serta kondisi geografis yang masi jauh dari saran pendidikan tingkat perekonomian mereka yang juga masi tergolong rendah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tersebut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK/TPA	5
2	SD	17
3	SLTP/SMP	3
4	SLTA/SMA	6
Jumlah		31

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan di Kecamatan Alla

Sumber: Kantor Camat Alla

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah fasilitas pendidikan secara keseluruhan di Kecamatan Alla sebanyak 31 unit. Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Alla antara lain : 5 unit Taman Kanak-Kanak (TK), 17unit Sekolah Dasar (SD), 3 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan 6 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sedangkan perguruan tinggi belum ada di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

4. Mata Pencaharian

Salah satu unsur kebudayaan yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah mata pencaharian, manusia bermata pencaharian hidup adalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan dapat mengembangkan kehidupan mereka. Mata pencaharian hidup pada masyarakat di Kecamatan Alla pada umumnya adalah Bertani dan Berkebun, karena luas lahan yang digunakan untuk dapat mengolah menjadi sawah dan perkebunan.

Adapun beberapa warga diantaranya sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai di perusahaan seperti Pertamina, dan Tambang Marmer.

5. Kehidupan Sosial Budaya

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa.

Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa

dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.

Permukiman suku Duri ini berbatasan dengan Tana Toraja. Permukiman orang Duri berada di kecamatan Baraka, Anggeraja dan Alla, yang terdiri dari 17 desa. Hari ini daerah seperti ke Pare-Pare, Toraja, Makassar, hingga ke provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan ke pulau-pulau lain hingga ke Malaysia, menjadi tempat orang-orang suku Duri bermigrasi. Kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi menjadi keseharian sifat orang Duri.

Dahulu, mereka mengenal adanya status sosial dari kaum bangsawan, rakyat biasa dan budak. Hari ini, segala bentuk kasta sosial itu sudah mereka hapuskan. Status sosial yang dianut oleh mereka kini berdasarkan pendidikan dan kekayaan yang dimiliki, kebangsawanan sudah tidak berlaku lagi untuk mereka. Suku Enrekang dan suku Maroangin (Marowangin) merupakan koalisi dari suku Duri yang tergabung dalam satu kesatuan yang disebut sebagai suku Massenrempulu.

Meskipun secara ras dan bahasa suku Duri cenderung dekat dengan suku Toraja. Bahasa Duri mirip dengan bahasa Toraja, oleh karena itu suku Duri sering dianggap sebagai bagian dari suku Toraja. Meskipun memiliki kekerabatan dekat dengan Toraja, suku Duri banyak berpengaruh adat istiadat suku Bugis. Sehingga kadang-kadang orang Duri juga dianggap sebagai sub-suku dari suku Bugis.

Islam menjadi agama bagi sebagian besar orang suku Duri. *Alu' Tojolo* menjadi agama kepercayaan tradisional mereka sebelum Islam masuk ke suku Duri. Agama kepercayaan tradisional ini mirip dengan agama kepercayaan tradisional suku Toraja. Meskipun Islam telah mendarah daging bagi orang suku Duri, namun sebagian kecil orang Duri masih ada yang mempertahankan agama kepercayaan tradisional. Misalnya di Baraka, pengikut agama kepercayaan *Alu' Tojolo* ini mengadakan pertemuan secara teratur 1-2 kali dalam sebulan.

Masyarakat suku Duri juga tetap mempertahankan dan memelihara adat-istiadat sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Petani menjadi mata pencarian sebagian besar masyarakat suku Duri. Beberapa di antara mereka menanam tanaman keras dan memelihara hewan ternak. Sebagian kecil lagi membuat barang kerajinan. Adapun tanaman pertanian suku Duri, terdiri dari padi, jagung, ubi, cabai, dan bawang merah.

Selain itu, ada pula yang memproduksi keju yang diolah secara tradisional yang dikenal dengan nama dangke. Keju tersebut diolah dari susu sapi dan kerbau ditambah sari buah atau daun pepaya. Dari uraian di atas, terlihat bahwa suku Duri memiliki hasil pertanian dan peternakan yang cukup beragam. Namun dampak secara ekonomi belum begitu signifikan. Hal tersebut karena infrastruktur berupa jalan yang laik belum mereka dapatkan. Jalan tersebut untuk memperlancar distribusi hasil tani yang akan dijual.

Hari ini tercatat sekitar 60% desa-desa belum memiliki sarana jalan yang memadai. Hal ini mengakibatkan distribusi hasil-hasil bumi mereka menjadi mahal dan memakan waktu yang lama. Diperlukan penyuluhan pertanian untuk

mengolah tanah yang kurang subur, belum lagi bantuan modal, dan cara pendistribusian barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Duri.

6. **Kehidupan Keberagamaan**

Konsepsi kepercayaan mulai muncul ketika adanya kesadaran manusia bahwa, adanya kekuatan lain yang lebih mengagumkan terhadap hal-hal atau gejala-gejala tertentu yang sifatnya luar biasa, yang lebih besar diluar kekuatan manusia itu sendiri, yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia yang disebut kekuatan supranatural. Hal serupa juga dirasakan masyarakat Enrekang pada masa lampau dimana mereka mulai mengenal suatu kepercayaan yang disebut Aluk Tojolo.

Aluk Tojolo ini berdasarkan tujuh asas yang terbagi dalam dua bagian. Pertama, yang berkaitan dengan kepercayaan yang terdiri atas tiga asas yang dikenal "Tallu Aluk Pamula" yaitu: 1. Percaya dan menyembah kepada Puang Matua sebagai sang pencipta alam, 2. Percaya dan menyembah kepada Dewata-dewata yang memelihara ciptaan Puang Matua. Pengertian dewata berasal dari kata Den Watanna yang artinya memiliki suatu kekuatan, ada beberapa Dewata yang dikenal pada masyarakat Enrekang yang namanya disesuaikan dengan tempat mereka berada, seperti dewata jo palli yaitu dewata yang berada pada gunung palli, dewata yang menguasai air dan sumber air disebut Dewata Jo Wai dan masih banyak lagi dewata-dewata lain yang dikenal dalam masyarakat, 3. Percaya dan menyembah kepada Tojolo sebagai pemberi berkah dan memelihara kepada keturunannya.

Kedua, berkaitan dengan kehidupan yang terdiri atas empat asas atau yang dikenal dengan nama “A’pa’ Pamula Ada” yaitu: 1. Ada’ Tojolo, yakni adat kelahiran manusia 2. Ada’ Tolino, yakni adat kehidupan dari pada manusia 3. Ada’ Peta’da Damban, yakni adat penyembahan kepada tuhannya 4. Ada’ Tomate, yakni adat kematian manusia. Sebagai lambang penghormatan baik kepada dewata maupun kepada roh nenek moyang agar diberi perlindungan/keselamatan terhadap pengaruh jahat dan memberikan berkat/kesejahteraan kepada mereka. Bersumber dari kepercayaan tersebut maka timbulah upacara ritual. Upacara-upacara ritual tersebut antara lain:

- a. Upacara adat *maccera manurung* (untuk menghormati arwah leluhur)
- b. Upacara *mangkande-kande* (pada saat turun sawah/panen)
- c. Upacara *mampejampi* (pengobatan)
- d. Upacara *meta’da barakka* (meminta berkah).

Kepercayaan *Aluk Tojolo* di Enrekang berintikan pada dua hal, yakni pandangan terhadap kosmos dan kesetiaan kepada leluhur.

BAB V

PERAN SERTA HPMM CABANG ALLA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara yang dilakukan oleh 10 informan yang terdiri dari 5 orang masyarakat Kecamatan Alla, 3 orang yang merupakan tokoh/pengurus organisasi HPMM Cabang Alla dan 2 orang dari Pemerintah Setempat, dalam wawancara ini menggunakan teknik triangulasi. Cara pengambilan sampelnya yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* dengan beberapa pertimbangan peneliti. Peneliti melakukan penelitian kurang lebih 2 bulan terhitung tanggal 22 Agustus – 12 Oktober 2017 yang di lakukan terkhusus di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian ini di peroleh dengan teknik wawancara informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dalam bahasan penelitian tentang peran HPMM Cabang Alla dalam mengawal (kinerja) Pemerintah di Kabupaten Enrekang yang kemudian di analisis oleh peneliti, serta dalam observasi langsung peneliti kepada informan tersebut, dan apabila datanya sudah terkumpul maka data tersebut kemudian di analisis. Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Alla terlihat beberapa pemuda/mahasiswa yang aktif dalam suatu organisasi terkhusus organisasi HPMM Cabang Alla. Terbukti dengan banyaknya perkumpulan remaja di sebuah rumah dalam membahas beberapa topik, baik itu topik pemerintahan

maupun topik kemanusiaan untuk masyarakat Kecamatan Alla, dan banyak juga memasang pertanda berupa spanduk dan bendera HPMM Cabang Alla.

Dalam Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak mahasiswa yang acuh tak acuh ikut berperan dalam suatu organisasi internal maupun dalam organisasi eksternal dan begitupun dengan sebaliknya, ada mahasiswa yang ikut dalam suatu organisasi untuk menaikkan status sosial mereka atau untuk membedakan dia dari golongan Mahasiswa bukan dari golongan masyarakat awam.

Dengan demikian perangkat peran bergeser dari kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus menjadi pembeda status sosial Mahasiswa. Sedangkan peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Peran HPMM Cabang Alla adalah bagaimana melaksanakan fungsi organisasi sebagai penyalur atau penyambung aspirasi dan harapan-harapan masyarakat terhadap kontrol di pemerintahan. Dan kemudian setelah observasi, peneliti melakukan sebuah wawancara terhadap beberapa informan yang di ambil dari pengurus HPMM Cabang Alla, Pemerintah Kecamatan Alla, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama dan Warga setempat yang berdomisili di Kecamatan Alla Terkhususnya.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh MD (22 th), sebagai ketua umum HPMM Cabang Alla menuturkan, bahwa:

“HPMM Cabang Alla itu adalah wadah atau tempat berkumpulnya Mahasiswa yang bertujuan sebagai penyambung lidah masyarakat yang kadang tidak didengarkan oleh pemerintah, bukan tempat untuk membodoh-bodohi orang awam” (wawancara, 28 Agustus 2017).

Hal yang sama diungkapkan oleh informan WAS (21 th), selaku sekertaris umum HPMM Cabang Alla mengemukakan, bahwa:

“Organisasi ini kadang dihuni orang yang berpura-pura cerdas. Ku kita-kita mane, ada yang cerdas dalam beretorika hanya untuk mendapatkan lawan jenisnya di internal organ maupun diluar organ sampai-sampai dia lupa akan tujuan dari HPMM Cabang Alla itu sendiri” (wawancara, 30 Agustus 2017).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bagaimana bisa kita mewujudkan cita-cita organisasi HPMM Cabang Alla jikalau sebagian dari kualitas anggota mementingkan kesenangan pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat Kecamatan Alla, kalau ingin mengawal kinerja pemerintahan yang harus ditanamkan dalam diri setiap individu anggota/pengurus organisasi itu adalah mengawal diri sendiri terlebih dahulu, dalam artian sesuai dengan tujuan organisasi HPMM Cabang Alla.

Oleh sebab itu, HPMM menjadi wadah membina pelajar dan mahasiswa Massenrempulu dalam mengembangkan potensi, kreatifitas, keilmuan, ekonomi produktif dan sosial budaya. Berperan aktif dalam dunia pendidikan, kebudayaan

dan kepemudaan untuk mendorong pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Bagi masyarakat Massenrempulu, HPMM adalah agen untuk menyampaikan isu-isu, keluhan dan aspirasi yang ada di masyarakat kepada pemerintah kabupaten Enrekang.

Untuk mewujudkan peran HPMM dalam proses perjuangan menuju cita-cita idealnya, maka HPMM dituntut untuk menjalankan fungsinya. Kehadiran kader adalah sebuah kemestian suatu hal yang mutlak. Maka fungsi HPMM sebagai organisasi pengkaderan adalah kebutuhan organisasi dan masyarakat. HPMM sepenuhnya menyadari bahwa cita-cita ideal dari lahirnya organisasi hanya dapat diraih dengan usaha-usaha teratur, terencana dengan penuh kebijaksanaan.

Seperti yang diungkapkan oleh informan AL (21 thn), yang menjabat sebagai bendahara umum HPMM Cabang Alla menuturkan bahwa:

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam strategi HPMM Cabang Alla itu harus sesuai apa yang di kerjakan oleh pemerintah dengan bagaimana mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat Kecamatan Alla”(wawancara, 2 September 2017).

Ditambahkan lagi oleh informan RR (23 thn), sebagai anggota HPMM Cabang Alla, mengatakan bahwa:

“Iya kami akan membantu, Karena HPMM Cabang Alla tidak akan ada sampai saat sekarang ini kalau bukan salah satunya untuk masyarakat Kecamatan Alla maka seharusnya kita sebagai Anggota organisasi HPMM

sekaligus Anggota Masyarakat Kecamatan Alla” (wawancara, 28 Agustus 2017).

Dari beberapa hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Alla menunjukkan bahwa Pengurus HPMM Cabang Alla di haruskan ikut andil dalam rangka mempertegas eksistensi organisasi HPMM sebagai salah satu lembaga kemahasiswaan yang representatif untuk mewadahi seluruh pelajar dan mahasiswa Massenrempulu, maka hal yang paling strategis untuk dilakukan adalah dengan mempertegas peran dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi HPMM. Berkenaan dengan itu, HPMM akan senantiasa dituntut untuk melakukan pembenahan secara internal organisasi melalui upaya pementapan dan penanganan proses pengkaderan secara profesional dalam rangka menciptakan kader-kader HPMM yang memiliki komitmen dan integritas yang mantap, yang pada gilirannya kader-kader tersebut akan memiliki kesiapan baik secara mental maupun konsepsional dalam rangka mendorong dan mewarnai proses dinamisasi peran di HPMM, masyarakat dan pemerintahan.

Adapun salah satu dari tokoh masyarakat, yakni RWR (42 thn) yang diwawancarai mengatakan bahwa:

“Anak-Anak dari mahasiswa sangat banyak membantu dalam membangun desa dan kecamatan, seperti ikut serta dalam tanggap bencana yg dilakukan di belajen, tanjung, sudu dan beberapa daerah lainnya yg pernah terjadi kebakaran baik itu berupa dana pemerintah yang di alokasikan kepada korban maupun berupa bahan pokok berupa sandan, papan dan pangan tidak kalah penting lagi bantuan fisik dari

mahasiswa yg secara sukarela tanpa meminta imbalan” (wawancara, 1 oktober 2017).

Dari pernyataan tersebut menunjukkan Peran serta HPMM terhadap kinerja pemerintah merupakan bentuk dari kesadaran partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Pada awalnya fungsi yang diperankan oleh HPMM adalah melakukan kontrol sosial serta membangun kesadaran kolektif untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pembangunan. Peran HPMM dalam pemberdayaan masyarakat adalah fasilitator yaitu melakukan persiapan masyarakat, menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah, dengan demikian konflik dapat terdeteksi lebih awal. Peran lainnya adalah advokasi (*advocacy*) yang ditujukan sebagai korelasi atas penyimpangan-penyimpangan, sedangkan misi pokoknya bagaimana membuat masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri dan tidak menyerahkan semuanya untuk diurus oleh pemerintah. Artinya HPMM menjadi rekan kerja pemerintah dan penyambung lidah masyarakat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Berikut gambar dimana kegiatan yang dilakukan HPMM Cabang Alla dan pemerintahan kepada masyarakat di kecamatan Alla.



Gambar 5.1 Aksi solidaritas korban kebakaran di kecamatan Alla

Sumber: Arsip HPMM Cabang Alla 2017



Gambar: 5.2 Persiapan Bakti Sosial HPMM Cabang Alla di Kecamatan Alla

Sumber: Arsip HPMM Cabang Alla 2017

Berdasarkan hasil dokumentasi tersebut, bahwa sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan, HPMM Cabang Alla dituntut untuk lebih sigap dalam merespon apa yang terjadi di masyarakat dan juga menguatkan korelasi hubungan antara pemerintahan dan masyarakat. Sebab dunia organisasi kemahasiswaan bukanlah ajang untuk bagaimana cara menyelamatkan diri

masing-masing secepatnya menyelesaikan studi kampus dan bekerja, tapi untuk tidak menghilangkan hubungan saling membutuhkan dan saling menegembangkan antara organisasi mahasiswa dan masyarakat.

Dalam menjalankan amanah sebagai *agent of chage*, organisasi mahasiswa seperti HPMM Cabang Alla sangat dibutuhkan peran strategisnya dalam membantu masyarakat. Hal ini dikarenakan ada beberapa potensi dan kekuatan dalam sebuah organisasi. Pertama, organisasi mahasiswa memiliki potensi untuk menggerakkan massa yang cukup rill. Kedua, memiliki legitimasi sebagai representasi universitas/daerah untuk melakukan suatu kegiatan. Ketiga, organisasi mahasiswa memiliki kader-kader yang mumpuni dan cenderung lebih berkomitmen untuk aktif membangun masyarakat.

BAB VI

DAMPAK YANG DIPEROLEH MASYARAKAT DARI PERAN HPMM CABANG ALLA

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara yang dilakukan oleh 10 informan yang terdiri dari 5 orang masyarakat Kecamatan Alla, 3 orang yang merupakan tokoh/pengurus organisasi HPMM Cabang Alla dan 2 orang dari Pemerintah Setempat, dalam wawancara ini menggunakan teknik triangulasi. Cara pengambilan sampelnya yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* dengan beberapa pertimbangan peneliti. Berikut pembahasan hasil penelitian pada rumusan masalah II.

Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara dengan informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dalam bahasan penelitian tentang dampak yang diperoleh masyarakat dari peran HPMM Cabang Alla yang kemudian di analisis oleh peneliti berkaitan dengan peran HPMM Cabang Alla dalam mengawal (kinerja) Pemerintah di Kabupaten Enrekang yang kemudian di analisis oleh peneliti, serta dalam observasi langsung peneliti kepada informan tersebut, dan apabila datanya sudah terkumpul maka data tersebut kemudian di analisis.

Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Alla terlihat beberapa pemuda/mahasiswa yang aktif dalam suatu organisasi terkhusus organisasi HPMM Cabang Alla. Terbukti dengan banyaknya perkumpulan remaja di sebuah rumah dalam pembahasan beberapa topik baik itu topik pemerintahan maupun topik kemanusiaan untuk masyarakat Kecamatan Alla. Mahasiswa pada saat ini

merupakan harapan terbesar bagi masyarakat sebagai penyambung lidah rakyat terutama sebagai agen perubahan di masyarakat. Sebagai salah satu potensi, mahasiswa adalah bagian dari kaum muda dalam tatanan masyarakat yang mau tidak mau pasti terlibat langsung dalam tiap fenomena sosial, harus mampu mengimplementasikan kemampuan keilmuannya dalam gerakan perubahan kearah berkeadaban. Seperti halnya peran yang dilakukan oleh HPMM Cabang Alla untuk terlibat langsung dalam setiap perubahan tatanan dalam masyarakat maupun tatanan dalam pemerintahan, mengingat fungsi organisasi kemahasiswaan sebagai *social control* termasuk terhadap kebijakan yang menindas rakyat.

Dan kemudian setelah observasi, peneliti melakukan sebuah wawancara terhadap beberapa informan yang diambil dari warga setempat yang bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagian dari pengurus HPMM Cabang Alla.

1. Dampak Sosial

Dampak sosial dalam hal ini yang dimaksudkan peneliti berkaitan dengan penelitian adalah segala dampak-dampak yang ditimbulkan ke masyarakat Kecamatan Alla berkenaan dengan peran HPMM Cabang Alla terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Enrekang. Ada beberapa dampak yang diperoleh masyarakat dari peran HPMM Cabang Alla yakni dampak positif dan dampak negatif, sebagai berikut:

a. Dampak Positif

Pada dampak positif ini dapat terlihat dari keterbukaan sebagian besar unsur pemerintahan terhadap peran HPMM Cabang alla untuk menganalisa

masalah, menyikapi, melakukan *social control* dan menyampaikan realita yang ada di masyarakat disertakan dengan solusinya.

b. Dampak Negatif

Dalam dampak negatif ditunjukkan dengan adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat untuk mengambil keuntungan pribadi.

Berdasarkan penjelasan diatas berkenaan dengan dampak yang diperoleh masyarakat dari peran HPMM Cabang Alla, berikut adalah hasil penelitian yang didapat di lapangan menunjukkan bahwa informan dapat menjelaskan dampak tersebut, baik itu dampak positif dan dampak negatif. Untuk itu akan dijabarkan hasil wawancara beberapa informan yang memberikan pernyataan, seperti yang dirasakan oleh informan RS (55 th), warga kecamatan alla sebagai salah satu tokoh agama di kelurahan Buntu Sugi, menuturkan bahwa:

“Organisasi HPMM Cabang Alla ini cukup baik dan selalu perhatian terhadap isu-isu yang ada di kecamatan alla, cepat tanggap dan cepat bergerak untuk menghubungi pemerintah setempat” (wawancara, 7 September 2017).

Ditambahkan juga oleh informan AO (38 th), warga kecamatan alla yang berprofesi sebagai Guru SD di Alla, mengatakan bahwa:

“HPMM Cabang Alla ini bisa dikatakan cerdas dalam mengambil keputusan dan mudah mendapatkan perhatian warga setempat baik orang tua sampai anak muda-mudi, sering juga ia buat acara-acara kalau waktu-waktu senggang, kalau acara 17 Agustus juga pasti aktif juga memeriahkan dan sekaligus menjadi panitia acara” (wawancara, 10 September 2017).

Begitu pula informan yang bernama RU (25 th), warga kecamatan alla, berprofesi sebagai mekanik bengkel motor, mengatakan bahwa:

“Peran HPMM Cabang Alla untuk masyarakat itu sangat penting. Mereka itu mahasiswa nah maka mahasiswa itu harus mengetahui tingkat bahasa warga yang mudah untuk dipahami jangan sok-sokan mau menggunakan bahasa yang kedengarannya keren tapi tidak di mengerti warga, satu lagi untuk organisasi ini kurangnya yaitu tidak mentransferansikan dana-dana yang didapatkan itu dari mana, hanya langsung memberikan warga dana tanpa mengetahui ini dana dari mahasiswa atau dana dari pemerintah” (wawancara, 25 September 2017).

Dari hasil wawancara beberapa informan mengatakan hal yang sama bahwa informan merasakan dampak yang beriringan yaitu dampak negatif dan dampak positif, informan merasa mudah untuk berkomunikasi dengan Pemerintah setempat berkat bantuan para mahasiswa terkhususnya Pengurus HPMM Cabang Alla, Karena kerja keras pengurus dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita Organisasi maka dapat membuahkan hasil yang berupa kepercayaan dari Masyarakat Alla dan Pemerintah Setempat, Disisi lain, terkadang ada beberapa warga yang sulit memahami apa yang di ucapkan oleh mahasiswa dalam artian menggunakan bahasa ilmiah, begitupun selalu mempertanyakan dana bantuan yang di berikan oleh mahasiswa secara langsung ini didapat dari pemerintah, bantuan warga atau bantuan perkumpulan mahasiswa yang kuliah di Makassar.

Seperti yang di ungkapkan oleh James D. Mooney Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengikuti organisasi mahasiswa dapat mengaktualisasikan dirinya. Selain itu, mahasiswa juga akan memiliki kemampuan lebih di bandingkan dengan mereka yang tidak pernah ikut organisasi dan mampu membangun karakter mahasiswa yang matang dalam berpikir, pandai dalam bersosialisai dan kritis dalam

menyikapi permasalahan selain itu bisa melatih soft skill di luar kegiatan perkuliahan

Walapun pada kenyataannya memang tidak semua mahasiswa mau menjadi aktivis dan mempunyai kepedulian terhadap perkembangan yang terjadi di dalam maupun luar kampus, tapi gerakan aktivis yang peduli sudah mampu mewarnai dinamika kehidupan mahasiswa di kampus. Cukup banyak kontribusi mahasiswa, melalui organisasi kemahasiswaannya, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai disiplin ilmunya masing-masing atau menjadi motivator, mediator dan akselerator dalam menyikapi perubahan dan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Baik itu menyangkut masalah sosial, ekonomi maupun politik.

Terkadang ada kesan miring terhadap keberadaan aktivis di organisasi kemahasiswaan yang antara lain banyaknya aktivis organisasi kemahasiswaan yang merupakan ‘mahasiswa abadi’ atau mahasiswa rawan *drop out* (DO). Banyak hal yang melatar belakangi mengapa hal ini terjadi, sehingga alangkah baiknya bila kita liat sosok mahasiswa yang ada dikampus. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang mahasiswa yang aktif di kampus akan tetapi tidak aktif dalam satupun organisasi internal maupun organisasi kedaerahan sekalipun :

“Saya kah dilarang memangka berorganisasi karna naganggu-ganggu aktivitas perkuliahan, rata-rata teman kelasku yang aktif dalam organisasi itu jelek semua nilainya karna jarang masuk belajar, sekalinya ada datang kuliah mau semua di bilang pintar, arogan mi di kelas kalau kumpul sesamanya di kampus na tatap mi orang yang lewat seperti mi dia

punya itu kampus, sedikit-sedikit perang mi sesama organda bikin takut saja” (wawancara, 13 September 2017).

Mahasiswa yang apatis terhadap kegiatan organisasi kemahasiswaan tentu saja merupakan mahasiswa yang hanya memikirkan aktifitas perkuliahannya saja. Segala sesuatunya selalu diukur dengan pencapaian kredit mata kuliah dan indeks prestasi yang tinggi serta berupaya menyelesaikan kuliah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun biasanya sosok mahasiswa seperti ini, justru akan mengalami kelemahan dan masalah dalam hal sosialisasi diri dengan lingkungannya, sesama mahasiswa dan masyarakat. Yang dampak negatifnya bisa saja dirasakan ketika sudah menjadi sarjana dan siap terjun ke masyarakat memasuki dunia kerja.

Sedangkan sosok mahasiswa aktivis dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, adalah mahasiswa yang disamping menekuni aktifitas perkuliahan tapi juga menyempatkan untuk mengikuti aktifitas organisasi kemahasiswaan. Keaktifan di organisasi ini biasanya dilandasi oleh bakat, hobi, tuntutan jiwa organisasi dan kepemimpinan, tuntutan sosial atau bisa jadi karena pelarian dari aktivitas perkuliahan yang kadang dianggapnya membosankan. Konsekuensi logis dari sosok mahasiswa seperti ini tentunya konsentrasi pemikiran dan waktu akan terbagi menjadi dua, satu sisi pada perkuliahan dan sisi yang lain pada kegiatan organisasi. Kegiatan perkuliahan juga terkadang malah terganggu oleh kegiatan organisasi atau bahkan ada yang meninggalkannya karena terlalu asyik. Sehingga terkadang menjadi alasan pembenar bahwa mahasiswa

aktivis adalah mahasiswa abadi dan rawan DO. Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu *Demisioner* (Mantan Pengurus HPMM Cabang Alla) :

“Semua bergantung dari kita sendiri bukan organisasi yang membuat kita lambat selesai dalam perkuliahan, akan tetapi kita yang pintar dalam membagi waktu, kalau ada yang bilang aktivis itu lambat selesai maka saya sebagai aktivis pun dapat mengatakan mereka yang anak akademis atau yang mementingkan kuliah saja itu cepat menganggur dan tidak mengetahui langkah apa lagi yang akan di ambil setelah selesai kuliah, contohnya lama studi saya 5 tahun dan langsung ditawarkan oleh beberapa anggota pemerintahan untuk masuk kerja, bukan menyombongkan diri tapi kadang saya muak dengan perkataan Mahasiswa Apatis jo’o” (wawancara, 22 September 2017).

Dari pernyataan wawancara diatas memang tidak mudah mengimbangi waktu kegiatan perkuliahan dan kegiatan organisasi disitulah mahasiswa dituntut untuk lebih taktis, memprioritaskan, memanage waktu yang mereka ambil. Organisasi tidak ada bayarannya secara materi, malah secara materi tidak jarang kita harus mengorbankan sesuatu demi organisasi. Tapi kita bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman luar biasa yang tidak di dapatkan oleh orang-orang luar organisasi. Capek, sakit, pusing menghadapi masalah, tekanan, senang ngekritik orang itu semua didapatkan di organisasi, menjadi sangat terasa karena disitulah seni organisasi. banyak hal yang terjadi karena organisasi , sadarkah kita bahwa ketika kita sedang sendiri pun kita sedang berorganisasi. mengorganisasikan pikiran kita. mengorganisasikan ide-ide kita, mengorganisasikan harapan-harapan kita.

Organisasi kedaerahan seperti HPMM Cabang Alla sangat dibutuhkan mengingat fungsinya sebagai wadah pemersatu sesama mahasiswa perantau, yang membutuhkan keluarga, yang mampu menjaga dan membantu selama di perantauan. Eksistensinya sampai saat ini memang masih ada, terbukti dengan mudahnya organisasi daerah ditemukan di kampus-kampus. Lebih jauh, HPMM Cabang Alla diharapkan menjadi sarana kontribusi untuk Kecamatan Alla, tentu dengan fokus pada pembangunan daerah. Menjaga nilai-nilai budaya daerah agar tidak luntur ditengah arus modernisasi dan heterogenitas budaya yang ada di kampus. Selain itu, HPMM Cabang Alla juga berperan dalam menjaga semangat dan cita-cita untuk kembali membangun daerah dan kembali ke masyarakat setelah selesai kuliah. Seperti hasil wawancara peneliti dengan informan HN (52 th), selaku Camat Alla, menyampaikan bahwa:

“Saya sebagai orang yang ada di pemerintahan,.....saya juga pernah bagian dari HPMM Cabang Alla di tahun 1989 dan sangat bangga dengan eksistensi mereka sampai sekarang, biasa ka’ juga merasa malu dengan HPMM Cabang Alla, kenapa saya bilang begitu? Karena pelayanan saya kepada mereka itu sangat jauh dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan untuk masyarakat kecamatan Alla. Bahkan ketika diwaktu luang mereka memberikan semacam masukan/dukungan moral ke saya selaku Camat Alla dan teman-teman PNS yang bagaimana sebaiknya kami berkerja didalam pemerintahan dan bahkan mereka sering bertukar pendapat dengan saya” (wawancara, 2 September 2017).

Selanjutnya wawancara dengan informan MS (57 th), sebagai Sekertaris Camat Alla, mengatakan bahwa:

“Kalau ada kegiatan, anggota HPMM Cabang Alla kadang tidak seberapa barangkali sebagian masih ada kesibukan kampus masing-masing sehingga hanya perwakilan anggota yang ada, yatoda na la bisa onarakua kamu mo jolo sang sibukki te kuliah, daripada kuliahnya nanti terlambat. Na kita juga orang tua maunya anak kita cepat selesai. Dan setiap kita juga manusia pasti ada kekurangannya apalagi dalam bentuk organisasi seperti HPMM Cabang Alla, apalagi yang berorganisasi juga anak muda yang masih panas-panasnya, masih gampang terpancing emosinya” (wawancara, 4 September 2017).

Ditambahkan lagi oleh informan SB (30 th), warga kecamatan alla, mengungkapkan bahwa:

“Biasa itu caranya berbicara dengan orang yang lebih dewasa kayak kurang sopan dan kadang juga kurang tau diri, susi to sipangkada ri solana. Memang bebas keterbukaan dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh negara tetapi jangan kita mengambil keputusan bahwa kita seperti amerika, bukan, tidak. Kita bukan Amerika, kita bukan orang Jawa, kita bukan orang Jakarta, bahwa kita ini orang Duri. Orang Duri itu punya etika, punya sopan santun dan saya harap itu dijaga baik-baik mane” (wawancara, 5 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Organisasi mahasiswa daerah seperti HPMM Cabang Alla sebaiknya bukan hanya sebagai tempat kumpul-kumpul anak rantau yang mencari hiburan karena banyak kesibukan di kampus, tetapi juga menjadi pemberi manfaat bagi daerah yang ditempati, juga daerah asal. Karena sebenarnya organisasi mahasiswa daerah adalah duta dari daerahnya

masing-masing yang harus menjaga nama baik daerah dan putra-putri daerah yang diharapkan akan kembali membangun daerahnya selepas menuntut ilmu di tanah rantau. Terhadap pemerintah daerah, HPMM Cabang Alla dapat mempromosikan budaya, pariwisata, hingga potensi daerah kabupaten Enrekang pada umumnya, kecamatan Alla pada khususnya ke universitas dan masyarakat luas.

HPMM Cabang Alla harus pula selalu menjaga anggotanya, meningkatkan rasa kekeluargaan dipererat melalui faktor kedaerahan untuk berkontribusi kepada masyarakat, contohnya seperti proyek sosial dikampung halaman, sosialisasi universitas, hingga advokasi isu-isu tertentu. Jika selama ini masih ada anggota HPMM Cabang Alla yang menganggap organisasi sebatas ‘tempat kumpul-kumpul’, mungkin harus diajak pulang kampung sebentar. Tentu saja, banyak sekali hal yang bisa dilakukan putra-putri HPMM Cabang Alla yang sedang menuntut ilmu di tanah rantau untuk masyarakat Alla dan pemerintah di kecamatan Alla.

Berikut beberapa gambar pengambilan informasi peneliti dari masyarakat:



Gambar 6.1 Wawancara dengan tokoh masyarakat kelurahan Buntu Sugi kecamatan Alla

Sumber: Abdul Wahid 7 September 2017



Gambar 6.2 Kegiatan perayaan HUT RI ke 72

Sumber: Arsip HPMM Cabang Alla 2017

Terlihat pada hasil dokumentasi diatas bahwa, peran HPMM Cabang Alla sebagai bagian dari masyarakat sosial sangat ditunggu. Diharapkan mampu memainkan peran yang strategis, kesatuan visi, tekad, dan perjuangan untuk kepentingan masyarakat kecamatan Alla, menjadi pondasi utama peran tersebut saat ini dan nanti. Namun mewujudkan hal tersebut, HPMM Cabang Alla sekali lagi perlu pemetaan, perumusan, dan penelaan metode penerapan fungsi organisasi di masyarakat dan pemerintahan.

Pemahaman arti penting sebuah organisasi dan aktivitas organisasi mahasiswa kepada masyarakat, terkhususnya orang tua para mahasiswa adalah salah satu persoalan yang harus diluruskan. Adanya anggapan berorganisasi berarti berdemonstrasi, atau berorganisasi tidak lebih dari sekedar membuang sebagian waktu, energi, ajang mencari kawan dan mencari jodoh merupakan bukti adanya kesalahpahaman tentang persepsi sebagian mahasiswa dan para orang tua mahasiswa itu sendiri.

Sejatinya mahasiswa melalui wadah organisasi kemahasiswaan tidak menjadi menara gading yang angkuh ditengah sulitnya kondisi masyarakat. Toeri-teori yang diperoleh dikampus tidak akan menemukan esensinya jika tidak diterapkan di masyarakat. Untuk itu, HPMM Cabang Alla sebagai wadah mahasiswa daerah sudah waktunya kembali ke khittahnya sebagai pengayom dan selalu hadir di masyarakat. Dengan demikian, satu media yang dapat membentuk kematangan mahasiswa dalam hidup bermasyarakat ialah organisasi. Dengan senantiasa berorganisasi maka mahasiswa akan senantiasa terus berinteraksi dan

beraktualisasi, sehingga menjadi pribadi yang kreatif serta dinamis dan lebih bijaksana dalam persoalan sosial yang dihadapi.

BAB VII

PERAN HPMM DALAM MENGAWAL PEMERINTAH SEBUAH PEMBAHASAN TEORETIS

A. Peran Serta HPMM Cabang Alla terhadap Kinerja Pemerintah di Kabupaten Enrekang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998:23).

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajibankewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004:244):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan

rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Rentang tanggung jawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844), yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004:245).

Terkait dengan peran pemerintah dalam memberikan layanan pendaftaran hak cipta maka hal tersebut merupakan jenis pelayanan administrasi umum pemerintahan yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Pemerintah daerah provinsi dalam hal ini diberikan hak otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ketentuan umum angka 5, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah provinsi juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

B. Dampak yang Diperoleh Masyarakat dari Peran yang Dilakukan oleh HPMM Cabang Alla

Masyarakat sering berpikir bahwa dunia psikologi adalah dunia yang berkaitan dengan persoalan perasaan, motivasi, kepribadian, dan yang sejenisnya. Dan kalau berpikir tentang sosiologi, secara umum cenderung memikirkan persoalan kemasyarakatan. Kajian utama psikologi adalah pada persoalan kepribadian, mental, perilaku, dan dimensi-dimensi lain yang ada dalam diri manusia sebagai individu. Sosiologi lebih mengabdikan kajiannya pada budaya dan struktur sosial yang keduanya mempengaruhi interaksi, perilaku, dan kepribadian.

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa bergantung ia bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab jika hanya sendirian ia tidak “menjadi” manusia. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yang bermacam-macam. Di satu sisi

ia menjadi anak buah, tetapi di sisi lain ia adalah pemimpin. Di satu sisi ia adalah ayah atau ibu, tetapi di sisi lain ia adalah anak. Di satu sisi ia adalah kakak, tetapi di sisi lain ia adalah adik. Demikian juga dalam posisi guru dan murid, kawan dan lawan, buruh dan majikan, besar dan kecil, mantu dan mertua dan seterusnya.

Sosiolog Robert Park dari Universitas Chicago memandang bahwa masyarakat mengorganisasikan, mengintegrasikan, dan mengarahkan kekuatan-kekuatan individu-individu ke dalam berbagai macam peran (*roles*). Melalui peran inilah kita menjadi tahu siapa diri kita. Kita adalah seorang anak, orang tua, guru, mahasiswa, laki-laki, perempuan, Islam, Kristen. Konsep kita tentang diri kita tergantung pada peran yang kita lakukan dalam masyarakat. Untuk itu, mempelajari teori peran dipandang perlu.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekanto, 1984: 237).

Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports).
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoepetri, Arimbi dan Santosa, 2003).

BAB VIII

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah melalui proses pengumpulan data melalui wawancara dan observasi serta studi pustaka, maka peneliti menarik kesimpulan mengenai penelitian “Peran HPMM Cabang Alla dalam Mengawal Kinerja Pemerintah di Kabupaten Enrekang” adalah sebagai berikut :

1. Peran serta HPMM terhadap kinerja pemerintah merupakan bentuk dari kesadaran partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Pada awalnya fungsi yang diperankan oleh HPMM adalah melakukan kontrol sosial serta membangun kesadaran kolektif untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Peran HPMM dalam pemberdayaan masyarakat adalah fasilitator yaitu melakukan persiapan masyarakat, menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah, dengan demikian konflik dapat terdeteksi lebih awal. Peran lainnya adalah advokasi (*advocacy*) yang ditujukan sebagai korelasi atas penyimpangan-penyimpangan, sedangkan misi pokoknya bagaimana membuat masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri dan tidak menyerahkan semuanya untuk diurus oleh pemerintah. Artinya HPMM menjadi rekan kerja pemerintah di kabupaten Enrekang.
2. Dari peran HPMM Cabang Alla tentunya mempunyai dampak untuk masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah komunikasi, penyampaian isu dan pengambilan kebijakan yang tidak

sesuai dengan pemerintah terasa mudah dengan bantuan HPMM Cabang Alla sebagai pendamping (*fasilitator* dan *motivator*) dan memperhatikan unsur partisipasi masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah dengan adanya beberapa pihak/orang yang mengambil keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan organisasi dan aspirasi masyarakat. Dan sebagian masyarakat juga yang mempunyai anak kuliah beranggapan bahwa organisasi akan mengganggu ataupun memperlambat masa kuliah bagi anak-anak mereka.

B. Saran

Berdasarkan data hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka berikut ini ada beberapa saran:

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam menambah khasanah keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada program studi sosiologi dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi pembaca, diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan sekaligus mampu memberikan stimulus untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik yang terkait sehingga studi sosiologi selalu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Bagi pemerintah, hendaknya mampu memberikan keadilan bagi masyarakatnya agar tidak ada yang merasakan diskriminasi dan kecemburuan sosial. Tidak lagi menyebabkan suatu konflik atau permasalahan dengan

terrealisasinya program pemerintah. Serta mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang semestinya.

4. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi subangsi pengetahuan tentang peran organisasi dan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah.
5. Bagi organisasi HPMM, cerdas dalam berorganisasi dan bertindak sebagaimana disiplin ilmu dan disiplin berorganisasi, sehingga kinerja HPMM Cabang Alla dalam mengawal pemerintah di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang berjalan dengan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan Tujuan dasar organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM), sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan usaha-usaha yang teratur, terencana dan berkesinambungan dalam sebuah sentuhan manajemen organisasi yang profesional.
6. Saat ini banyak opini yang menyatakan bahwa kedekatan organisasi memang sangat terlihat jelas pada partai politik, dikarenakan iming-iming bantuan dana yang terselubung untuk melancarkan apa yang di inginkan oleh partai politik, baik itu berdampak negatif. Sedangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sangat jelas terpampang bahwa “tidak di perbolehkan Ketua dan jajarannya menggunakan suatu organisasi kepemudaan kedalam partai politik, apalagi berdampak negatif terhadap pemerintahan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amba, M. 1998 . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat*. Pascasarjana, IPB, Bogor.
- Bungin, 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Loviani, (2015). *Kinerja Organisasi Pemerintah Desa Di Desa Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau*.
- Muluk, Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Siswanto, 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan ke 23*. Bandung: Alfabeta.
- Soeharto, I. 2002. *Studi Kelayakan Proyek Industri*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sujana, (2012). *Pengaruh Kompetisi, Motivasi, Kesesuaian Peran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung dan Buleleng)*. JINAH (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 2(1).

Sukma, (2013). *Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Dalam Partai Politik Di Kecamatan Sukawati*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Suryabrata, Sumadi, 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutarto, 2006. *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Umam, Khaerul. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung : CV. Pustaka Setia

Weber, Max, 2009. *Sosiologi, Cet. II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, diterjemahkan oleh, Noorkholish dan Tim Penerjemah Promothea, dari Judul Asli, From Max Weber: Essay in Sociology. Oxford University Press, 1946.

Pedoman Dasar Organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM)

Dokumen perundang-undangan: *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008*

<http://yusrizalfirzal.wordpress.com/tag/pengertian-instrumen-penelitian>.

Diakses pada tanggal 30 September 2016: 17.07.

LAMPIRAN



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin Tlp : (0411) 860132 Makassar 90221

DAFTAR INFORMAN

Berikut ini merupakan daftar informan yang ditemui oleh peneliti dalam melakukan penelitian di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

No	Nama	Umur	Pendidikan
1	Drs.Hanapi	52 tahun	S1
2	Mustaming	57 tahun	SMA
3	Rasyid	55 tahun	SMA
4	Ratnawati Rio S.Pdi	42 tahun	S1
5	Rahmat Untung	25 tahun	SMA
6	Samsul Bakri	30 tahun	SMA

7	Ani O S.pd	38 tahun	S1
8	Muh Derwin	28 tahun	SMA
9	Wiryo Ade Sarlita	44 tahun	SMA
10	Ayu Lestari	39 tahun	SMA
11	Rum Royen	23 tahun	SMA

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Camat Alla





Wawancara dengan Sekertaris Camat Alla



Wawancara dengan Warga Kecamatan Alla



Wawancara dengan Warga Kecamatan Alla



Wawancara dengan warga Kecamatan Alla



Wawancara dengan Warga Kecamatan Alla



Wawancara dengan Tokoh Agama Kecamatan Alla





Wawancara dengan Ketua Umum HPMM Cabang Alla



Wawancara dengan Sekertaris Umum HPMM Cabang Alla



Wawancara dengan Bendahara Umum HPMM Cabang Alla



Wawancara dengan Anggota dan Demisioner HPMM Cabang Alla

RIWAYAT HIDUP



ABDUL WAHID, lahir di Sudu pada tanggal 22 Februari 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara oleh pasangan Arif dengan Risma Rio. Mulai masuk pendidikan formal di MI Kambiolangi pada tahun 2000 dan tamat tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Alla tahun 2006 dan tamat tahun 2009. Kemudian melanjutkannya lagi di SMK Negeri 1 Enrekang dari tahun 2009 hingga tamat pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2012, penulis mendaftar di Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada Jurusan Pendidikan Sosiologi.

Motivasi untuk melanjutkan pendidikan adalah kemauan dan niat serta iringan doa dari orang tua dan saudara. Perjuangan panjang penulis menjadi mahasiswa di perguruan tinggi sampai akhirnya penulis menyusun karya ilmiah/skripsi di akhir tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018 yang berjudul “Peran HPMM Cabang Alla dalam Mengawal (Kinerja) Pemerintah di Kabupaten Enrekang” dapat diselesaikan dengan baik.